



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2024



Penyerahan Sertifikat
Berpredikat
&
Penyerahan
Piagam Achiyasa Ipa





DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

(Tahun 1970 sampai sekarang)

H. Bambang Myanto, S.H., M.H

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2022- Sekarang



R. Hadi Purnomo, S.H

(1970 - 1975)



Soeroto, S.H

(1975 - 1982)



Roesli, S.H

(1982 - 1988)



Zakir, S.H

(1988 - 1992)



Soelistyowati Soegondo, S.H

(1992 - 1997)



H. Parman Soeparman, S.H

(1997 - 2000)



Soejatno, S.H

(2000 - 2005)



M. Hatta Ali, S.H., M.H

(2005 - 2007)



Cicut Sutriarso, S.H., M.Hum

(2008 - 2013)



DR Herri Swantoro, S.H., M.H

(2014 - 2019)



DR Prim Haryadi, S.H., M.H

(2019 - 2022)

Profil Pimpinan

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



**H. Bambang Myanto,
S.H., M.H**

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum



**Kurnia Arry S, S.E., S.H.,
M.Hum**

Serketaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum



Hasanudin, S.H., M.H

Direktur Pembinaan Tenaga
Teknis Peradilan Umum



Zahlisa Vitalita, S.H., M.H

Direktur Pembinaan
Administrasi Peradilan
Umum

Mahkamah Agung RI

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Dibantu Oleh:

Dipimpin Oleh:

**Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Umum**

**Sekretaris Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Umum**

**Direktur Pembinaan
Tenaga Tenis
Peradilan Umum**

**Direktur Pembinaan
Administrasi
Peradilan Umum**

Visi dan Misi

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

VISI

Terwujudnya Badan Peradilan
Umum yang Agung

MISI

01

Menjaga Kemandirian Badan
Peradilan Umum;

02

Meningkatkan Dukungan
Pelayanan Hukum yang
Berkeadilan bagi Pencari
Keadilan

03

Meningkatkan Kualitas
Kepemimpinan Badan
Peradilan Umum;

04

Meningkatkan Kredibilitas
dan Transparansi Badan
Peradilan Umum

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Tugas

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata, tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum

Tugas

Fungsi

01

Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan peradilan Umum;

02

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

03

Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan adminitrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum

04

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

05

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



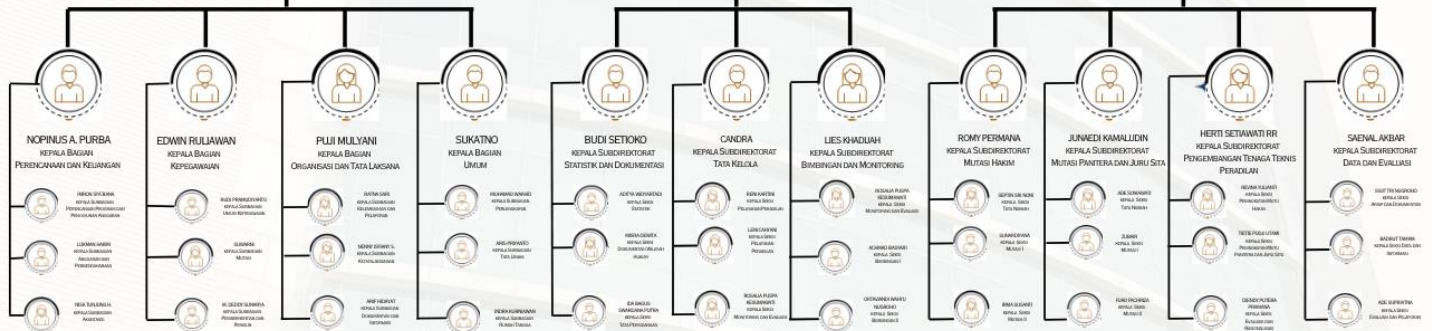
KURNIA ARRY SOELAKSONO
SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



ZAHLIISA VITALITA
DIREKTUR
PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM



HASANUDIN
DIREKTUR
PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM



Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Tantangan di dunia peradilan terus berkembang maka dari itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu melakukan perbaikan untuk dapat memenuhi kebutuhan

pelayanan publik dan berkomitmen untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada dengan semangat perbaikan berkelanjutan dapat menciptakan pengadilan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan dibawahnya berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan respon tuntutan masyarakat melalui berbagai kebijakan pembaharuan serta perbaikan sistem yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan terbaik pada pencari keadilan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertuang secara terbuka dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024, namun kami menyadari adanya keterbatasan sehingga pasti ditemukan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, semoga kerja keras kita dapat membawa Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum dalam mewujudkan peradilan yang modern sebagai harapan kita bersama.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 20 Februari 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

DAFTAR ISI

Profil Pimpinan.....	iii
Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KEADAAN PERKARA.....	3
1. Jumlah Pengadilan.....	3
A. Jumlah Pengadilan Negeri.....	3
B. Klasifikasi Pengadilan Tinggi	4
C. Jumlah Pengadilan Khusus	4
2. Keadaan Perkara Pada Pengadilan.....	4
A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	4
B. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi	26
3. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan.....	27
A. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri	27
B. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi	31
4. Capaian Prioritas Nasional.....	34
A. Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	34
B. Sidang Diluar Gedung Pengadilan.....	35
C. Pembebasan Biaya Perkara	37

D. Restoratif Justice	37
E. Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)	39
5. Penghargaan Pengadilan.....	39
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	51
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial.....	51
a. Data Hakim Seluruh Indonesia	51
b. Promosi dan Mutasi Hakim	53
c. Hukuman Disiplin Hakim.....	54
d. Pensiun, Diberhentikan dan Meninggal Dunia Hakim	54
e. Diklat Hakim.....	54
f. Data Kepaniteraan Seluruh Indonesia	56
g. Promosi dan Mutasi Panitera.....	57
h. Hukuman Disiplin Panitera.....	57
i. Pensiun dan Meninggal Panitera	58
2. Sumber Daya Manusia Non Yustisial.....	58
A. Data Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	58
B. Pelatihan, Diklat dan Asessment	60
C. Rekrutmen, Latsar dan Piagam	60
D. Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar.....	61
E. Kenaikan Pangkat.....	61
3. Bimbingan Teknis Peradilan Umum	61
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA ...	67
1. Pengelolaan Keuangan.....	67
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	68

3. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	79
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	80
1. Zona Integritas	80
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	81
3. Inovasi Pelayan Publik.....	83
4. Kunjungan Internasional	89
BAB VI PENGAWASAN.....	90
1. INTERNAL	90
2. EVALUASI	91
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	92
1. KESIMPULAN	92
2. REKOMENDASI.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pengadilan Negeri	3
Tabel 2.2 Klasifikasi Pengadilan Tinggi.....	4
Tabel 2.3 Jumlah Pengadilan Khusus.....	4
Tabel 2.4 Perkara Gugatan.....	5
Tabel 2.5 Perkara Permohonan	7
Tabel 2.6 Perkara Gugatan Sederhana	8
Tabel 2.7 Perkara Gugatan Perlawanan/Bantahan.....	9
Tabel 2.8. Perkara Berhasil Mediasi	10
Tabel 2.9 Perkara Niaga	11
Tabel 2.10 Perkara PHI.....	12
Tabel 2.11 Perkara Pidana Biasa	13
Tabel 2.12 Pidana Singkat.....	14
Tabel 2.13 Perkara Pidana Cepat.....	15
Tabel 2.14 Perkara TIPIKOR	17
♦ Tabel 2.15 Perkara Pidana Khusus Anak	18
Tabel 2.16 Perkara Khusus Perikanan.....	19
Tabel 2.17 Perkara Praperadilan	19
Tabel 2.18 Pelaku Tindak Pidana	20
Tabel 2.19 Pelaku Tipikor	21
Tabel 2.20 Pelaku Tindak Pidana Anak.....	22
Tabel 2.21 Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Anak.....	23
Tabel 2.22 Perkara Lalu Lintas	24
Tabel 2.23 Statistik E-Court	25
Tabel 2.24 Perkara Pengadilan Tinggi.....	26
Tabel 2.25 Perkara Pidana Pengadilan Tinggi.....	26
Tabel 2.26 Rerata Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri	27
Tabel 2.27 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Khusus.....	28
Tabel 2.28 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana	29

Tabel 2.29 Rerata Waktu Perkara Pidana Khusus.....	30
Tabel 2.30 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Tinggi.....	31
Tabel 2.31 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Pada Pengadilan Tinggi.....	32
Tabel 2.32 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi.....	33
Tabel 2.33 Posbakum	34
Tabel 2.34 Sidang Diluar Gedung.....	36
Tabel 2.35 Pembebasan Biaya Perkara.....	37
Tabel 2.36 Restorative Justice	38
Tabel 2.37 Penghargaan E-litigasi	43
Tabel 2.38 Pemenang Lomba Posbakum	46
Tabel 2.39 Pemenang Lomba Sidang Diluar Gedung.....	47
Tabel 2.40 Pemenang Lomba Prodeo	47
Tabel 3.1 Hakim Pergender.....	51
♦ Tabel 3.2 Kenaikan Pangkat Hakim.....♦	52
Tabel 3.3 Hakim Karir	52
Tabel 3.4 Hakim Ad Hoc.....	52
Tabel 3.5 Promosi dan Mutasi Hakim PN	53
Tabel 3.6 Promosi dan Mutasi Hakim PT	53
Tabel 3.7 Mutasi dan Penempatan Hakim Ad Hoc	53
Tabel 3.8 Hukdis Hakim.....	54
Tabel 3.9 Pensiun, Diberhentikan dan Meninggal Dunia Hakim.....	54
Tabel 3.10 Diklat Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	54
Tabel 3.11 Diklat Hakim Oleh Litbang	56
Tabel 3.12 Data Kepaniteraan Pergender	56
Tabel 3.13 Kenaikan Pangkat Panitera	57
Tabel 3.14 Promosi dan Mutasi Panitera.....	57
Tabel 3.15 Hukdis Panitera	57
Tabel 3.16 Pensiun dan Meninggal	58

Tabel 3.17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural	59
Tabel 3.18 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	59
Tabel 3.19 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin	60
Tabel 3.20 Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar	61
Tabel 3.21 Kenaikan Pangkat.....	61
Tabel 3. 22 Kegiatan Bimtek Ditjen Badilum.....	63
Tabel 3. 23 Bimtek Oleh Litbang	66
Tabel 4.1 Pagu	67
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran.....	68
Tabel 4.3 Tanah.....	71
Tabel 4.4 Gedung dan Bangunan.....	71
Tabel 4.5 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua.....	73
Tabel 4.6 Kendaraan Dinas Operasional Roda empat	73
Tabel 4.7 Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam	74
Tabel 4.8 Peralatan dan Mesin	74
♦ Tabel 4.9 Pengadaan Sarpras Belanja Modal	♦ 75
Tabel 4.10 Pembangunan/Rehabilitas Gedung dan Bangunan.....	75
Tabel 4.11 Pengadaan Kebutuhan Perkantoran (Belanja Barang).....	76
Tabel 4.12 Layanan Rapat	76
Tabel 4.13 Perbaikan/Prasarana Kantor.....	76
Tabel 4.14 Perawatan Peralatan Kantor.....	76
Tabel 4.15 Surat Masuk.....	78
Tabel 4.16 Surat Keluar.....	78
Tabel 4.17 Penomoran Surat.....	79
Tabel 4.18 Pemeliharaan.....	79
Tabel 4.19 Pemutakhiran.....	79
Tabel 5.1 Penghargaan PTSP	82
Tabel 5.2 Sarpras Disabilitas.....	87
Tabel 5.3 Statistik Disabilitas Berperkara	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perakara Gugatan	4
Gambar 2. 2 Permohonan	6
Gambar 2. 3 Pidana Biasa	13
Gambar 2. 4 Pidana Singkat	14
Gambar 2. 5 Pidana Cepat.....	15
Gambar 3. 1 Bimbingan Teknis.....	62
Gambar 5. 1 Satu Jari	83
Gambar 5. 2 Aplikasi SiGanis.....	85
Gambar 5. 3 Kunjungan Diligasi.....	89

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum mempunyai tugas dan fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di Lingkungan Peradilan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Ditjen Badilum senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan dan merespon kritik masyarakat melalui berbagai kebijakan pembaruan serta perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas aparatur yang transparan dan akuntabel secara konsisten hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima untuk mewujudkan peradilan yang agung. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035.

- ✦ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melakukan perbaikan tersebut berpedoman kepada nilai-nilai organisasi (7 nilai utama peradilan) dan nilai-nilai dasar ASN ber-AKHLAK serta visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh, sekaligus melaksanakan Reformasi Birokrasi yang telah menjadi agenda nasional, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menterjemahkan Cetak Biru dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (The Framework of Courts Excellence) sebagai langkah pembaruan yang taktis dan sistematis. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta transparansi, Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum menuangkan seluruh kegiatannya dalam sebuah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Ditjen Badilum sebagai unit Eselon I dibawah Mahkamah Agung R.I. membawahi 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi dan 382 (tiga

ratus delapan puluh dua) Pengadilan Negeri. Tentunya banyak program dan kebijakan serta inovasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Tahun 2024 Ditjen Badilum membuat program lanjutan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum melalui Program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH). Implementasi AMPUH melakukan monitoring / pengawasan dan asesmen pelaksanaan bidang teknis (core business) dan non teknis/pendukung (supporting unit) sebagai salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan.

Seluruh upaya diatas dirumuskan dalam program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) sebagai kelanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang menjamin kualitas layanan dan kinerja di lingkungan peradilan umum sebagai jawaban atas tuntutan tersedianya standar peradilan yang unggul yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

✦ Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh pihak serta menjadi tonggak awal dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, peradilan umum tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan integritas.

BAB II KEADAAN PERKARA

1. Jumlah Pengadilan

A. Jumlah Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia berjumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) wilayah Hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana berikut:

NO	Pengadilan Tinggi	Tipe	Pengadilan Negeri				Jumlah
			Klas IA Khusus	Klas IA	Klas IB	Klas II	
1	Banda Aceh	B	-	1	3	18	22
2	Medan	A	1	1	11	7	20
3	Padang	A	-	1	3	12	16
4	Riau	B	-	2	4	5	11
5	Kepulauan Riau	B	-	2	-	2	4
6	Jambi	B	-	1	1	8	10
7	Palembang	A	1	1	6	2	10
8	Bengkulu	B	-	1	1	7	9
9	Tanjung Karang	A	-	1	5	5	11
10	Bangka Belitung	B	-	1	1	3	5
11	DKI-Jakarta	A	5	-	-	-	5
12	Bandung	A	2	7	11	3	23
13	Jawa Tengah	A	2	6	25	2	35
14	Yogyakarta	B	-	3	2	-	5
15	Surabaya	A	2	11	15	7	35
16	Banten	B	1	1	1	1	4
17	Denpasar	A	-	1	3	4	8
18	Nusa Tenggara Barat	B	-	1	4	1	6
19	Kupang	B	-	1	1	14	16
20	Pontianak	B	-	1	3	6	10
21	Palangkaraya	B	-	1	2	8	11
22	Banjarmasin	A	-	2	6	5	13
23	Kalimantan Timur	B	-	2	1	6	9
24	Kalimantan Utara	B	-	-	2	2	4
25	Manado	B	-	1	3	4	8
26	Sulawesi Tengah	B	-	1	1	5	7
27	Makassar	A	1	2	5	15	23
28	Sulawesi Barat	B	-	1	1	2	4
29	Sulawesi Tenggara	B	-	1	3	5	9
30	Gorontalo	B	-	1	1	2	4
31	Ambon	B	-	1	-	7	8
32	Maluku Utara	B	-	1	-	5	6
33	Jayapura	B	-	1	-	6	7
34	Papua Barat	B	-	1	1	2	4
Total			15	60	126	181	382

Tabel 2.1 Jumlah Pengadilan Negeri

B. Klasifikasi Pengadilan Tinggi

1	Pengadilan Tingkat Banding Klasifikasi A	:	11	Pengadillan
2	Pengadilan Tingkat Banding Klasifikasi B	:	23	Pengadillan

Tabel 2.2 Klasifikasi Pengadilan Tinggi

C. Jumlah Pengadilan Khusus

1	A	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tk. Banding (Tipikor)	:	33	Pengadillan
	B	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tk. Pertama (Tipikor)	:	33	Pengadillan
2		Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	:	34	Pengadillan
3		Pengadilan Niaga	:	5	Pengadillan
4		Pengadilan HAM	:	4	Pengadillan
5		Pengadilan Perikanan	:	10	Pengadillan

Tabel 2.3 Jumlah Pengadilan Khusus

2. Keadaan Perkara Pada Pengadilan

A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

A.1 Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

a. Gugatan



Gambar 2. 1 Perkara Gugatan

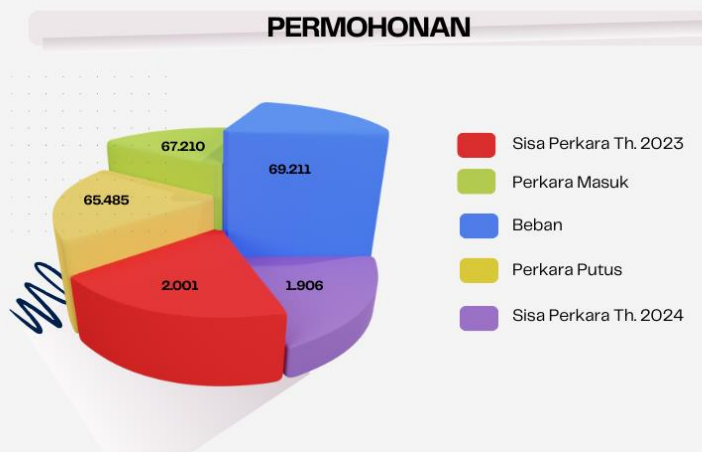
- Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan

NO	Pengadilan Tinggi	Gugatan								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	120	295	415	29	287	99	114	75	9
2	Medan	1,076	3,439	4,515	200	3,110	1,205	654	609	146
3	Padang	370	660	1,030	67	603	360	244	165	48
4	Riau	315	1,034	1,349	64	917	368	202	137	28
5	Jambi	204	526	730	60	453	217	149	100	21
6	Palembang	176	645	821	48	535	238	130	89	29
7	Bengkulu	63	116	179	7	124	48	34	19	7
8	Tanjung Karang	201	666	867	48	599	220	105	78	7
9	Bangka Belitung	42	227	269	7	212	50	19	18	6
10	Jakarta	2,341	4,703	7,044	326	4,497	2,221	1,148	982	193
11	Bandung	1,484	3,849	5,333	277	3,546	1,510	772	496	123
12	Semarang	883	3,203	4,086	295	2,870	921	624	370	61
13	Yogyakarta	230	665	895	48	625	222	131	72	11
14	Surabaya	1,432	4,291	5,723	424	3,824	1,475	898	596	124
15	Banten	793	1,755	2,548	67	1,594	887	280	173	61
16	Denpasar	927	4,409	5,336	177	4,141	1,018	302	190	40
17	Mataram	215	780	995	90	615	290	167	109	35
18	Kupang	351	919	1,270	44	888	338	186	118	31
19	Pontianak	181	992	1,173	87	863	223	108	71	22
20	Palangkaraya	178	670	848	42	601	205	79	48	20
21	Banjarmasin	122	576	698	17	537	144	106	62	16
22	Samarinda	364	1,050	1,414	94	927	393	244	164	46
23	Manado	549	2,515	3,064	42	2,416	606	173	112	52
24	Palu	179	650	829	46	568	215	120	62	22
25	Makassar	479	1,574	2,053	59	1,453	541	411	285	120
26	Kendari	112	297	409	16	312	81	100	70	38
27	Gorontalo	89	197	286	18	195	73	52	23	4
28	Ambon	133	524	657	9	499	149	87	60	17
29	Maluku Utara	80	249	329	23	249	57	43	30	3
30	Jayapura	213	612	825	6	577	242	65	35	8
31	Kepulauan Riau	159	605	764	34	554	175	82	55	11
32	Kalimantan Utara	40	138	178	10	115	53	20	15	5
33	Sulawesi Barat	38	149	187	5	160	22	29	23	8
34	Papua Barat	76	231	307	18	226	63	25	19	6
Total		14,215	43,211	57,426	2,804	39,692	14,929	7,903	5,530	1,378

Tabel 2.4 Perkara Gugatan

Berdasarkan data diatas jumlah perkara gugatan yang masuk sebanyak 43.211 perkara dimana sisa perkara pada tahun 2023 sebanyak 14.215 perkara sehingga beban perkara pada tahun 2024 sebesar 57.426 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2024 berhasil diputus sebanyak 39.692 perkara, sehingga persentase penyelesaian perkara pada tahun 2024 sebesar 69 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 72 % sehingga pada tahun 2023 persentase penyelesaian perkara menurun sebesar 3%.

b. Permohonan



Gambar 2. 2 Permohonan

Jumlah perkara permohonan yang masuk tahun 2024 yang masuk sebanyak 67.210 perkara, dimana sisa perkara tahun 2023 sebanyak 2.001 sehingga beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 69.211 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2024 berhasil diputus sebanyak 65.485 sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2024 sebesar 94 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara

sebesar 98 % sehingga pada tahun 2024 persentase penyelesaian perkara menurun 4%.

- Rekapitulasi Perkara Permohonan

NO	Pengadilan Tinggi	Permohonan								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	15	2,069	2,084	8	2,063	13	0	2	0
2	Medan	100	4,107	4,207	82	3,975	150	0	2	0
3	Padang	33	1,166	1,199	31	1,135	33	0	0	0
4	Riau	16	1,103	1,119	15	1,085	19	0	1	0
5	Jambi	5	445	450	10	430	10	0	0	0
6	Palembang	25	884	909	18	876	15	0	0	0
7	Bengkulu	8	401	409	6	399	4	0	2	0
8	Tanjung Karang	24	1,051	1,075	38	1,012	25	0	3	0
9	Bangka Belitung	2	361	363	1	354	8	0	1	0
10	Jakarta	410	5,156	5,566	262	4,956	348	0	11	0
11	Bandung	211	7,254	7,465	173	7,099	193	0	7	0
12	Semarang	169	6,424	6,593	181	6,248	164	0	1	0
13	Yogyakarta	155	2,981	3,136	86	2,954	96	0	0	0
14	Surabaya	311	10,489	10,800	466	10,083	251	0	10	0
15	Banten	123	2,537	2,660	35	2,514	111	0	5	0
16	Denpasar	112	2,158	2,270	55	2,107	108	0	5	0
17	Mataran	15	947	962	27	910	25	0	0	0
18	Kupang	38	2,406	2,444	48	2,378	18	0	1	0
19	Pontianak	20	2,085	2,105	71	2,016	18	0	2	0
20	Palangkaraya	11	653	664	6	648	10	0	1	0
21	Banjarmasin	13	1,238	1,251	6	1,235	10	0	1	0
22	Samarinda	28	1,289	1,317	60	1,202	55	0	0	0
23	Manado	34	2,164	2,198	22	2,140	36	0	0	0
24	Palu	-	274	274	11	260	3	0	0	0
25	Makassar	64	2,881	2,945	31	2,845	69	0	0	0
26	Kendari	1	442	443	11	426	6	0	0	0
27	Gorontalo	4	184	188	5	170	13	0	0	0
28	Ambon	2	475	477	5	469	3	0	0	0
29	Maluku Utara	1	346	347	4	342	1	0	0	0
30	Jayapura	13	1,536	1,549	16	1,489	44	0	0	0
31	Kepulauan Riau	32	819	851	16	801	34	0	1	0
32	Kalimantan Utara	3	272	275	3	264	8	0	0	0
33	Sulawesi Barat	-	210	210	3	204	3	0	0	0
34	Papua Barat	3	403	406	8	396	2	0	0	0
Total		2,001	67,210	69,211	1,820	65,485	1,906	0	56	0

Tabel 2.5 Perkara Permohonan

c. Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Gugatan Sederhana						
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan
1	Banda Aceh	3	32	35	1	32	2	4
2	Medan	33	346	379	30	321	28	41
3	Padang	9	226	235	16	203	16	17
4	Riau	6	291	297	19	270	8	12
5	Jambi	11	255	266	26	228	12	6
6	Palembang	29	727	756	48	666	42	11
7	Bengkulu	4	130	134	13	116	5	9
8	Tanjung Karang	11	306	317	14	284	19	7
9	Bangka Belitung	0	58	58	1	56	1	2
10	Jakarta	19	245	264	25	214	25	24
11	Bandung	55	1,374	1,429	110	1,255	64	61
12	Semarang	93	2,823	2,916	255	2,548	113	37
13	Yogyakarta	10	196	206	12	186	8	8
14	Surabaya	105	1,850	1,955	293	1,535	127	78
15	Banten	48	296	344	13	272	59	23
16	Denpasar	5	104	109	13	88	8	3
17	Mataram	3	176	179	13	153	13	7
18	Kupang	15	157	172	8	157	7	6
19	Pontianak	2	169	171	34	135	2	3
20	Palangkaraya	3	160	163	8	151	4	7
21	Banjarmasin	8	514	522	24	487	11	13
22	Samarinda	5	277	282	21	245	16	8
23	Manado	15	178	193	1	179	13	23
24	Palu	22	179	201	22	174	5	6
25	Makassar	11	199	210	3	192	15	20
26	Kendari	1	72	73	1	71	1	3
27	Gorontalo	4	101	105	2	95	8	7
28	Ambon	3	46	49	1	45	3	8
29	Maluku Utara	4	44	48	3	45	0	13
30	Jayapura	2	201	203	3	172	28	7
31	Kepulauan Riau	2	75	77	12	61	4	11
32	Kalimantan Utara	0	31	31	2	28	1	0
33	Sulawesi Barat	0	27	27	2	22	3	1
34	Papua Barat	1	72	73	4	64	5	1
Total		542	11,937	12,479	1,053	10,750	676	487

Tabel 2.6 Perkara Gugatan Sederhana

d. Jumlah Perkara Perdata Gugatan Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Perlawanan/Bantahan								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	10	13	23	2	15	6	9	4	1
2	Medan	36	123	159	10	84	65	47	27	2
3	Padang	24	33	57	5	33	19	10	6	2
4	Riau	11	25	36	3	23	10	15	9	1
5	Jambi	4	16	20	2	12	6	5	2	0
6	Palembang	4	20	24	0	15	9	8	5	2
7	Bengkulu	3	3	6	1	3	2	1	1	0
8	Tanjung Karang	7	21	28	0	21	7	11	8	0
9	Bangka Belitung	0	3	3	0	1	2	1	0	0
10	Jakarta	63	159	222	18	113	91	55	47	4
11	Bandung	83	154	237	13	132	92	60	43	7
12	Semarang	47	110	157	11	104	42	49	33	6
13	Yogyakarta	8	20	28	1	16	11	9	5	0
14	Surabaya	75	181	256	21	139	96	69	52	10
15	Banten	28	26	54	0	33	21	12	7	0
16	Denpasar	31	53	84	4	52	28	20	12	0
17	Mataram	23	45	68	7	40	21	22	15	3
18	Kupang	10	17	27	2	11	14	9	6	2
19	Pontianak	7	9	16	2	9	5	5	9	2
20	Palangkaraya	7	7	14	1	9	4	5	4	0
21	Banjarmasin	0	5	5	0	2	3	0	0	0
22	Samarinda	13	28	41	2	24	15	16	11	1
23	Manado	16	26	42	0	30	12	10	9	1
24	Palu	2	3	5	1	2	2	1	3	4
25	Makassar	21	72	93	5	58	30	35	26	6
26	Kendari	1	7	8	0	4	4	2	1	0
27	Gorontalo	4	17	21	0	14	7	4	3	0
28	Ambon	5	8	13	0	9	4	5	5	0
29	Maluku Utara	0	5	5	2	2	1	0	1	0
30	Jayapura	7	6	13	0	9	4	5	2	0
31	Kepulauan Riau	9	15	24	4	13	7	7	5	2
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	4	2	6	0	5	1	3	3	0
34	Papua Barat	3	3	6	1	5	0	5	2	0
Total		566	1,235	1,801	118	1,042	641	515	366	56

Tabel 2.7 Perkara Gugatan Perlawanan/Bantahan

e. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

NO	Pengadilan Tinggi	Mediasi				
		Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Banda Aceh	204	12	192	26	14
2	Medan	1,477	85	1,392	179	94
3	Padang	427	27	400	66	39
4	Riau	457	30	427	59	29
5	Jambi	307	26	281	43	17
6	Palembang	369	35	334	60	25
7	Bengkulu	74	1	73	3	2
8	Tanjung Karang	317	29	288	60	31
9	Bangka Belitung	75	7	68	10	3
10	Jakarta	2,291	228	2,063	480	252
11	Bandung	1,990	212	1,778	366	154
12	Semarang	1,706	236	1,470	326	90
13	Yogyakarta	343	33	310	51	18
14	Surabaya	2,343	269	2,074	400	131
15	Banten	803	101	702	168	67
16	Denpasar	1,093	93	1,000	168	75
17	Mataram	512	33	479	52	49
18	Kupang	446	28	418	57	29
19	Pontianak	374	46	328	58	12
20	Palangkaraya	286	17	269	29	12
21	Banjarmasin	222	28	194	41	13
22	Samarinda	521	37	484	64	27
23	Manado	583	47	536	88	41
24	Palu	272	26	246	35	9
25	Makassar	815	38	777	83	45
26	Kendari	185	11	174	14	3
27	Gorontalo	149	11	138	18	7
28	Ambon	209	12	197	24	12
29	Maluku Utara	103	13	90	15	2
30	Jayapura	189	12	177	28	16
31	Kepulauan Riau	191	12	179	30	18
32	Kalimantan Utara	50	6	44	9	3
33	Sulawesi Barat	48	2	46	3	1
34	Papua Barat	91	7	84	8	1
Total		19,522	1,810	17,712	3,121	1,311

Tabel 2.8. Perkara Berhasil Mediasi

A.2 Jumlah Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri

a. Jumlah Perkara Niaga

- Perkara Pailit

NO	Pengadilan Negeri	Pailit									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Medan	0	9	9	2	6	1	0	0	0	0
2	Jakarta	13	49	62	9	40	13	0	0	3	0
3	Semarang	3	14	17	1	13	3	0	0	4	0
4	Surabaya	3	17	20	0	13	7	0	0	0	0
5	Makassar	3	3	6	0	6	0	0	0	1	0
Total		22	92	114	12	78	24	0	0	8	0

- Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

NO	Pengadilan Negeri	PKPU									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Medan	12	31	43	4	27	12	0	0	0	0
2	Jakarta	134	392	526	65	340	121	0	0	14	0
3	Semarang	10	35	45	3	33	9	0	0	2	1
4	Surabaya	18	66	84	3	67	14	0	0	9	0
5	Makassar	3	14	17	0	12	5	0	0	1	0
Total		177	538	715	75	479	161	0	0	26	1

- Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

NO	Pengadilan Negeri	HAKI									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Medan	1	7	8	1	3	4	0	0	0	0
2	Jakarta	44	124	168	3	115	50	0	52	14	0
3	Semarang	4	5	9	0	8	1	0	6	0	0
4	Surabaya	2	11	13	1	6	6	0	4	0	0
5	Makassar	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
Total		51	148	199	5	133	61	0	63	14	0

Tabel 2.9 Perkara Niaga

b. Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

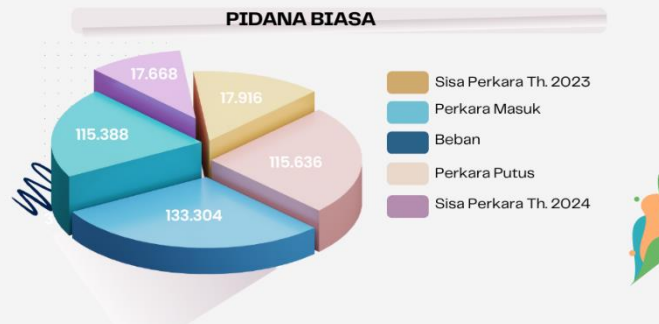
NO	Pengadilan Negeri	PHI							
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Kasasi
1	Banda Aceh	6	14	20	0	17	3	0	11
2	Medan	79	278	357	5	293	59	0	214
3	Padang	9	31	40	0	34	6	0	16
4	Pekanbaru	22	149	171	3	126	42	0	85
5	Jambi	6	26	32	1	31	0	0	18
6	Palembang	54	102	156	1	133	22	0	69
7	Bengkulu	1	4	5	0	4	1	0	3
8	Tanjung Karang	12	34	46	1	27	18	0	17
9	Bangka Belitung	0	35	35	1	24	10	0	10
10	Jakarta	124	351	475	15	347	113	0	197
11	Bandung	70	244	314	16	226	72	0	131
12	Semarang	21	82	103	6	77	20	0	42
13	Yogyakarta	13	34	47	2	25	20	0	16
14	Surabaya	22	157	179	4	129	46	0	65
15	Banten	33	109	142	3	96	43	0	44
16	Denpasar	5	23	28	2	21	5	0	10
17	Mataram	1	7	8	1	6	1	0	5
18	Kupang	0	8	8	0	7	1	0	2
19	Pontianak	9	59	68	2	54	12	0	23
20	Palangkaraya	13	11	24	0	23	1	0	19
21	Banjarmasin	5	22	27	0	24	3	0	17
22	Samarinda	8	68	76	3	55	18	0	31
23	Manado	1	18	19	0	16	3	0	9
24	Palu	0	19	19	0	17	2	0	7
25	Makassar	3	39	42	0	33	9	0	15
26	Kendari	1	22	23	0	18	5	0	12
27	Gorontalo	3	25	28	1	20	7	0	11
28	Ambon	1	11	12	0	10	2	0	3
29	Maluku Utara	19	4	23	0	23	0	0	22
30	Jayapura	0	36	36	0	33	3	0	10
31	Kepulauan Riau	8	48	56	0	35	21	0	12
32	Sulawesi Barat	0	7	7	0	5	2	0	4
33	Papua Barat	3	2	5	0	4	1	0	3
Total		552	2,079	2,631	67	1,993	571	0	1,153

Tabel 2.10 Perkara PHI

A.3 Jumlah Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

a. Jumlah Perkara Pidana

- Pidana Biasa



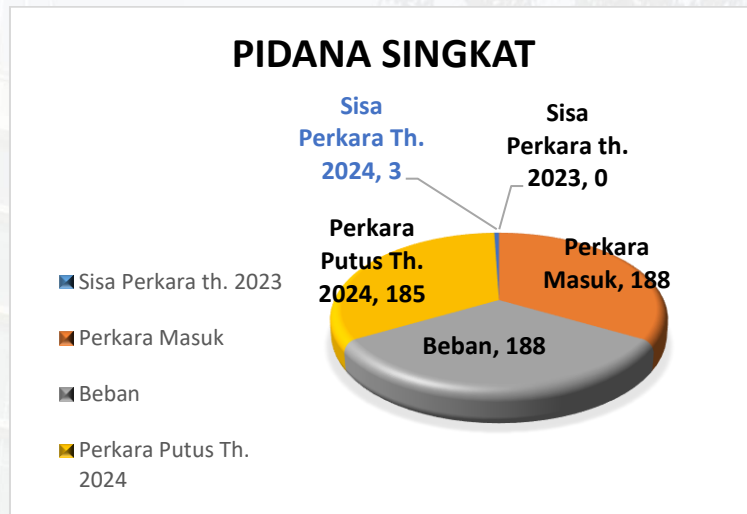
Gambar 2. 3 Pidana Biasa

- Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Biasa									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	374	2,869	3,243	0	2,890	353	580	370	9	0
2	Medan	2,389	11,943	14,332	0	11,995	2,337	2,595	1,914	233	1
3	Padang	460	3,093	3,553	0	3,165	388	591	324	155	1
4	Riau	931	6,521	7,452	0	6,319	1,133	888	514	430	6
5	Jambi	297	2,498	2,795	0	2,436	359	379	247	12	0
6	Palembang	850	5,993	6,843	0	5,876	967	435	2,215	40	2
7	Bengkulu	213	1,427	1,640	0	1,438	202	387	268	54	0
8	Tanjung Karang	504	4,190	4,694	0	4,183	511	458	261	26	0
9	Bangka Belitung	115	1,370	1,485	0	1,367	118	91	46	195	1
10	Jakarta	955	4,766	5,721	0	4,806	915	325	245	51	3
11	Bandung	1,735	9,588	11,323	0	9,823	1,500	514	334	48	1
12	Semarang	1,038	6,611	7,649	0	6,870	779	1,174	858	42	4
13	Yogyakarta	321	1,875	2,196	0	1,891	305	161	80	6	4
14	Surabaya	1,683	12,226	13,909	0	12,074	1,835	1,763	1,362	417	14
15	Banten	886	3,604	4,490	0	3,512	978	185	119	21	0
16	Denpasar	250	2,079	2,329	0	2,043	286	118	76	198	6
17	Mataram	345	2,455	2,800	0	2,379	421	283	160	19	0
18	Kupang	187	1,297	1,484	0	1,327	157	181	93	15	0
19	Pontianak	396	3,327	3,723	0	3,285	438	598	378	20	2
20	Palangkaraya	245	2,421	2,666	0	2,382	284	282	186	14	0
21	Banjarmasin	281	3,622	3,903	0	3,654	249	407	260	7	0
22	Samarinda	616	4,389	5,005	0	4,422	583	508	266	19	1
23	Manado	290	1,522	1,812	0	1,580	232	160	108	8	0
24	Palu	321	1,864	2,185	0	1,870	315	282	153	59	2
25	Makassar	838	5,202	6,040	0	5,302	738	1,652	1,139	43	0
26	Kendari	167	1,505	1,672	0	1,528	144	179	114	6	2
27	Gorontalo	143	617	760	0	651	109	149	90	4	0
28	Ambon	130	841	971	0	866	105	195	123	3	0
29	Maluku Utara	62	558	620	0	547	73	76	30	3	0
30	Jayapura	268	1,110	1,378	0	1,166	212	154	61	4	0
31	Kepulauan Riau	266	1,575	1,841	0	1,543	298	313	169	6	4
32	Kalimantan Utara	125	1,042	1,167	0	1,012	155	82	40	6	0
33	Sulawesi Barat	129	685	814	0	729	85	296	240	5	0
34	Papua Barat	106	703	809	0	705	104	56	27	2	0
	Total	17,916	115,388	133,304	0	115,636	17,668	16,497	12,870	2,180	54

Tabel 2.11 Perkara Pidana Biasa

- Pidana Singkat



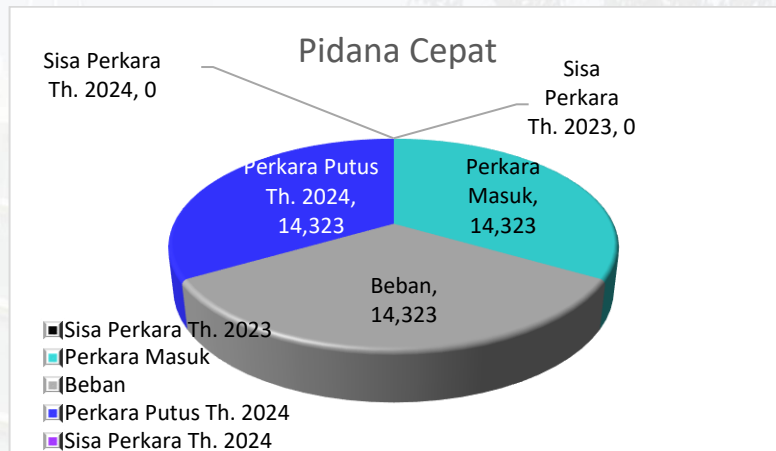
Gambar 2. 4 Pidana Singkat

- Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Singkat									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	0	2	2	0	2	0	1	0	0	0
2	Medan	0	27	27	0	27	0	5	0	0	0
3	Padang	0	2	2	0	2	0	1	0	0	0
4	Riau	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	37	37	0	37	0	1	0	0	0
6	Palembang	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	24	24	0	24	0	3	2	0	0
8	Tanjung Karang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jakarta	0	2	2	0	2	0	1	0	0	0
11	Bandung	0	9	9	0	9	0	1	0	0	0
12	Semarang	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
13	Yogyakarta	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0
14	Surabaya	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0
15	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Denpasar	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0
17	Mataram	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
18	Kupang	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
19	Pontianak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Banjarmasin	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0
22	Samarinda	0	4	4	0	1	3	0	0	0	0
23	Manado	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
24	Palu	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
25	Makassar	0	4	4	0	4	0	2	0	0	0
26	Kendari	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ambon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	188	188	0	185	3	16	3	0	0

Tabel 2.12 Pidana Singkat

- Pidana Cepat



Gambar 2. 5 Pidana Cepat

- Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Cepat								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	0	146	146	0	146	0	1	0	0
2	Medan	0	1,441	1,441	0	1,441	0	18	0	0
3	Padang	0	384	384	0	384	0	3	0	0
4	Riau	0	1,164	1,164	0	1,164	0	2	0	0
5	Jambi	0	410	410	0	410	0	0	0	0
6	Palembang	0	208	208	0	208	0	2	0	0
7	Bengkulu	0	106	106	0	106	0	0	0	0
8	Tanjung Karang	0	68	68	0	68	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	0	14	14	0	14	0	1	0	0
10	Jakarta	0	1,301	1,301	0	1,301	0	0	0	0
11	Bandung	0	632	632	0	632	0	0	0	0
12	Semarang	0	1,289	1,289	0	1,289	0	4	0	0
13	Yogyakarta	0	374	374	0	374	0	0	0	0
14	Surabaya	0	4,481	4,481	0	4,481	0	4	0	0
15	Banten	0	325	325	0	325	0	0	1	0
16	Denpasar	0	186	186	0	186	0	1	0	0
17	Mataram	0	89	89	0	89	0	7	0	0
18	Kupang	0	24	24	0	24	0	0	0	0
19	Pontianak	0	215	215	0	215	0	4	0	0
20	Palangkaraya	0	90	90	0	90	0	0	0	0
21	Banjarmasin	0	345	345	0	345	0	0	0	0
22	Samarinda	0	194	194	0	194	0	0	0	0
23	Manado	0	85	85	0	85	0	0	0	0
24	Palu	0	22	22	0	22	0	0	0	0
25	Makassar	0	165	165	0	165	0	1	0	0
26	Kendari	0	25	25	0	25	0	1	0	0
27	Gorontalo	0	21	21	0	21	0	0	0	0
28	Ambon	0	86	86	0	86	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	136	136	0	136	0	1	0	0
30	Jayapura	0	178	178	0	178	0	0	0	0
31	Kepulauan Riau	0	64	64	0	64	0	0	0	0
32	Kalimantan Utara	0	29	29	0	29	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	14	14	0	14	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	12	12	0	12	0	0	0	0
Total		0	14,323	14,323	0	14,323	0	50	1	0

Tabel 2.13 Perkara Pidana Cepat

Berdasarkan data diatas untuk perkara pidana biasa jumlah perkara yang masuk tahun 2024 sebanyak 115.388 perkara dimana sisa perkara tahun 2023 sebanyak 17.916 Perkara sehingga beban perkara pidana biasa tahun 2024 sebanyak 199.304 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2024 berhasil putus sebanyak 115.636 perkara sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2024 sebesar 86 %. Dibanding dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 83%, sehingga pada tahun 2024 persentase penyelesaian perkara meningkat sebesar 3 %.

Sedangkan untuk pidana singkat jumlah perkara yang masuk tahun 2024 sebanyak 188 perkara dimana sisa perkara tahun 2023 sebanyak 0 perkara. Beban perkara pidana singkat tahun 2024 sebanyak 188 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2024 berhasil diputus sebanyak 185 perkara maka persentase penyelesaian perkara tahun 2024 sebesar 98 %, dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 74 %. Pada tahun 2024 persentase penyelesaian perkara meningkat besar 24 %.

Untuk pidana cepat jumlah perkara yang masuk tahun 2024 sebanyak 14.323 perkara dimana sisa perkara tahun 2023 sebanyak 0 Perkara sehingga beban perkara pidana biasa tahun 2024 sebanyak 14.323 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2024 berhasil putus sebanyak 14.323 perkara maka persentase penyelesaian perkara tahun 2024 sebesar 100 %. Dibanding dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar

83%, sehingga pada tahun 2024 persentase penyelesaian perkara meningkat sebesar 17 %.

b. Jumlah Perkara Pidana Khusus

- Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

NO	Pengadilan Tinggi	Tindak Pidana Korupsi									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	28	73	101	0	77	24	47	49	3	0
2	Medan	73	153	226	0	165	61	68	46	15	0
3	Padang	31	61	92	0	60	32	29	28	11	0
4	Riau	22	77	99	0	74	25	25	15	12	0
5	Jambi	19	55	74	0	63	11	30	24	12	2
6	Palembang	23	84	107	0	66	41	28	30	6	0
7	Bengkulu	22	65	87	0	61	26	18	10	1	0
8	Tanjung Karang	17	42	59	0	52	7	12	10	5	0
9	Bangka Belitung	10	32	42	0	23	19	10	10	9	0
10	Jakarta	44	111	155	0	124	31	80	61	27	0
11	Bandung	30	112	142	0	98	44	44	33	18	0
12	Semarang	32	112	144	0	100	44	40	21	7	0
13	Yogyakarta	4	17	21	0	18	3	11	10	0	0
14	Surabaya	51	144	195	0	145	50	67	59	17	0
15	Banten	20	38	58	0	46	12	30	22	5	0
16	Denpasar	9	30	39	0	36	3	16	13	7	0
17	Mataram	18	42	60	0	41	19	32	17	11	0
18	Kupang	34	78	112	0	71	41	37	31	7	0
19	Pontianak	4	78	82	0	71	11	15	9	6	0
20	Palangkaraya	11	60	71	0	47	24	19	15	9	0
21	Banjarmasin	13	41	54	0	34	20	15	11	3	0
22	Samarinda	22	68	90	0	64	26	20	14	7	1
23	Manado	13	50	63	0	54	9	25	14	2	0
24	Palu	14	71	85	0	55	30	35	33	6	0
25	Makassar	51	120	171	0	129	42	64	78	18	0
26	Kendari	20	50	70	0	55	15	27	27	3	0
27	Gorontalo	7	27	34	0	20	14	7	13	2	0
28	Ambon	35	50	85	0	74	11	22	27	4	0
29	Maluku Utara	18	33	51	0	42	9	17	12	3	0
30	Jayapura	24	18	42	0	34	8	4	6	4	0
31	Kepulauan Riau	19	26	45	0	37	8	19	17	6	0
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	13	30	43	0	35	8	16	13	5	0
34	Papua Barat	12	34	46	0	31	15	23	17	1	0
Total		763	2,082	2,845	0	2,102	743	952	795	252	3

Tabel 2.14 Perkara TIPIKOR

- Perkara Pidana Khusus Anak

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Khusus Anak									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	18	50	68	0	48	20	6	5	0	0
2	Medan	52	500	552	0	504	48	84	46	0	0
3	Padang	13	147	160	0	148	12	20	5	0	0
4	Riau	22	183	205	0	186	19	28	16	2	0
5	Jambi	10	121	131	0	121	10	9	3	3	0
6	Palembang	30	257	287	0	263	24	18	8	0	0
7	Bengkulu	15	157	172	0	156	16	26	10	0	0
8	Tanjung Karang	22	289	311	0	290	21	23	8	1	0
9	Bangka Belitung	4	77	81	0	77	4	8	6	0	0
10	Jakarta	4	99	103	0	102	1	10	8	0	0
11	Bandung	49	426	475	0	440	35	52	33	2	0
12	Semarang	36	379	415	0	383	32	35	16	1	0
13	Yogyakarta	20	87	107	0	81	26	3	1	0	0
14	Surabaya	46	455	501	0	461	40	52	26	2	1
15	Banten	20	140	160	0	139	21	10	3	0	0
16	Denpasar	12	52	64	0	52	12	1	1	0	0
17	Mataram	18	100	118	0	109	9	10	6	0	0
18	Kupang	12	74	86	0	78	8	11	5	0	0
19	Pontianak	9	141	150	0	140	10	18	5	0	0
20	Palangkaraya	5	78	83	0	79	4	7	3	0	0
21	Banjarmasin	15	117	132	0	124	8	9	3	0	0
22	Samarinda	19	134	153	0	138	15	6	3	0	0
23	Manado	9	104	113	0	102	11	9	3	0	0
24	Palu	19	64	83	0	65	18	7	3	0	0
25	Makassar	38	192	230	0	197	33	21	13	0	0
26	Kendari	8	160	168	0	163	5	16	7	0	0
27	Gorontalo	12	23	35	0	25	10	7	4	0	0
28	Ambon	20	37	57	0	36	21	4	3	0	0
29	Maluku Utara	0	25	25	0	24	1	2	1	0	0
30	Jayapura	5	74	79	0	73	6	6	4	0	0
31	Kepulauan Riau	5	98	103	0	101	2	11	6	0	0
32	Kalimantan Utara	1	42	43	0	41	2	2	1	0	0
33	Sulawesi Barat	3	29	32	0	30	2	8	3	0	0
34	Papua Barat	2	49	51	0	49	2	3	0	0	0
Total		573	4,960	5,533	0	5,025	508	542	268	11	1

Tabel 2.15 Perkara Pidana Khusus Anak

- Perkara Pidana Khusus Perikanan

NO	Pengadilan Tinggi	Perikanan										
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Bandin g	Kasa si	PK	Grasi
1	Medan	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Jakarta	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
3	Pontianak	166	2	168	0	0	168	0	0	0	0	0
4	Manado	0	36	36	36	36	0	0	2	1	0	0
5	Ambon	0	6	6	6	6	0	0	3	3	0	0
6	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kepulauan Riau	0	10	10	10	10	0	0	1	1	0	0
8	Papua Barat	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Total		166	59	225	57	57	168	0	6	5	0	0

Tabel 2.16 Perkara Khusus Perikanan

c. Jumlah Perkara Pidana Praperadilan

NO	Pengadilan Tinggi	Praperadilan					
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir
1	Banda Aceh	1	15	16	0	15	0
2	Medan	15	196	211	0	186	9
3	Padang	5	41	46	0	38	4
4	Riau	1	39	40	0	34	2
5	Jambi	4	17	21	0	19	1
6	Palembang	0	52	52	0	48	2
7	Bengkulu	0	22	22	0	16	2
8	Tanjung Karang	5	15	20	0	19	1
9	Bangka Belitung	0	18	18	0	17	1
10	Jakarta	16	197	213	0	183	24
11	Bandung	9	131	140	0	126	6
12	Semarang	0	72	72	0	67	1
13	Yogyakarta	3	22	25	0	22	3
14	Surabaya	9	103	112	0	93	10
15	Banten	4	48	52	0	46	3
16	Denpasar	4	34	38	0	33	3
17	Mataram	3	44	47	0	32	5
18	Kupang	0	39	39	0	38	0
19	Pontianak	5	32	37	0	32	1
20	Palangkaraya	3	25	28	0	28	0
21	Banjarmasin	0	11	11	0	0	0
22	Samarinda	2	24	26	0	17	7
23	Manado	2	35	37	0	35	0
24	Palu	7	39	46	0	42	0
25	Makassar	8	62	70	0	61	7
26	Kendari	1	25	26	0	22	4
27	Gorontalo	1	34	35	0	30	3
28	Ambon	0	33	33	0	30	2
29	Maluku Utara	1	13	14	0	13	1
30	Jayapura	0	7	7	0	7	0
31	Kepulauan Riau	2	35	37	0	29	2
32	Kalimantan Utara	0	10	10	0	8	1
33	Sulawesi Barat	0	6	6	0	6	0
34	Papua Barat	2	12	14	0	11	0
Total		113	1,508	1,621	0	1,403	105

Tabel 2.17 Perkara Praperadilan

d. Jumlah Pelaku Tindak Pidana

- Pelaku Tindak Pidana Biasa

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Pidana		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banda Aceh	3,080	147	3,227
2	Medan	12,938	624	13,562
3	Padang	3,041	214	3,255
4	Riau	7,141	355	7,496
5	Jambi	2,735	132	2,867
6	Palembang	6,536	336	6,872
7	Bengkulu	1,521	92	1,613
8	Tanjung Karang	4,684	203	4,887
9	Bangka Belitung	1,617	93	1,710
10	Jakarta	5,281	452	5,733
11	Bandung	10,971	563	11,534
12	Semarang	7,616	422	8,038
13	Yogyakarta	2,021	178	2,199
14	Surabaya	13,494	779	14,273
15	Banten	4,068	212	4,280
16	Denpasar	2,323	228	2,551
17	Mataram	2,628	172	2,800
18	Kupang	1,516	116	1,632
19	Pontianak	3,717	226	3,943
20	Palangkaraya	2,819	177	2,996
21	Banjarmasin	3,993	278	4,271
22	Samarinda	4,748	285	5,033
23	Manado	1,625	154	1,779
24	Palu	2,058	157	2,215
25	Makassar	5,291	505	5,796
26	Kendari	1,597	133	1,730
27	Gorontalo	699	77	776
28	Ambon	863	73	936
29	Maluku Utara	624	62	686
30	Jayapura	1,227	73	1,300
31	Kepulauan Riau	1,656	155	1,811
32	Kalimantan Utara	1,092	94	1,186
33	Sulawesi Barat	695	50	745
34	Papua Barat	783	43	826
Total		126,698	7,860	134,558

Tabel 2.18 Pelaku Tindak Pidana

- Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Pidana Korupsi		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banda Aceh	73	8	81
2	Medan	139	19	158
3	Padang	41	6	47
4	Riau	74	12	86
5	Jambi	56	5	61
6	Palembang	84	12	96
7	Bengkulu	65	7	72
8	Tanjung Karang	38	5	43
9	Bangka Belitung	31	1	32
10	Jakarta	114	13	127
11	Bandung	107	13	120
12	Semarang	102	13	115
13	Yogyakarta	17	1	18
14	Surabaya	129	31	160
15	Banten	37	3	40
16	Denpasar	23	15	38
17	Mataram	44	7	51
18	Kupang	63	16	79
19	Pontianak	74	5	79
20	Palangkaraya	53	9	62
21	Banjarmasin	35	8	43
22	Samarinda	68	4	72
23	Manado	37	15	52
24	Palu	68	10	78
25	Makassar	110	19	129
26	Kendari	50	4	54
27	Gorontalo	29	3	32
28	Ambon	46	5	51
29	Maluku Utara	30	4	34
30	Jayapura	15	4	19
31	Kepulauan Riau	24	3	27
32	Kalimantan Utara	0	0	0
33	Sulawesi Barat	30	3	33
34	Papua Barat	29	5	34
Total		1,935	288	2,223

Tabel 2.19 Pelaku Tipikor

- Pelaku Tindak Pidana Anak

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Anak		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banda Aceh	59	7	66
2	Medan	630	11	641
3	Padang	147	12	159
4	Riau	191	6	197
5	Jambi	147	16	163
6	Palembang	288	5	293
7	Bengkulu	172	10	182
8	Tanjung Karang	352	5	357
9	Bangka Belitung	89	0	89
10	Jakarta	113	9	122
11	Bandung	577	8	585
12	Semarang	536	12	548
13	Yogyakarta	99	0	99
14	Surabaya	646	8	654
15	Banten	182	4	186
16	Denpasar	64	2	66
17	Mataram	112	4	116
18	Kupang	85	4	89
19	Pontianak	163	4	167
20	Palangkaraya	108	2	110
21	Banjarmasin	128	13	141
22	Samarinda	143	9	152
23	Manado	132	4	136
24	Palu	75	2	77
25	Makassar	213	19	232
26	Kendari	191	4	195
27	Gorontalo	29	0	29
28	Ambon	41	2	43
29	Maluku Utara	30	0	30
30	Jayapura	89	5	94
31	Kepulauan Riau	109	10	119
32	Kalimantan Utara	47	5	52
33	Sulawesi Barat	31	0	31
34	Papua Barat	59	1	60
Total		6,077	203	6,280

Tabel 2.20 Pelaku Tindak Pidana Anak

e. Jumlah Perkara Pidana Anak berhasil Melalui Diversi

NO	Pengadilan Tinggi	Penyelesaian Perkara pidana Melalui Diversi				
		Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan/ Proses
1	Banda Aceh	50	17	11	3	3
2	Medan	500	66	27	25	14
3	Padang	147	27	12	3	12
4	Riau	183	33	6	8	19
5	Jambi	121	37	21	6	10
6	Palembang	257	68	40	11	17
7	Bengkulu	157	28	7	9	12
8	Tanjung Karang	289	44	26	2	16
9	Bangka Belitung	77	8	3	1	4
10	Jakarta	99	66	10	6	50
11	Bandung	426	84	33	16	35
12	Semarang	379	53	31	11	11
13	Yogyakarta	87	14	8	4	2
14	Surabaya	455	136	57	9	70
15	Banten	140	35	9	3	23
16	Denpasar	52	7	4	1	2
17	Mataram	100	17	6	6	5
18	Kupang	74	13	7	2	4
19	Pontianak	141	15	7	1	7
20	Palangkaraya	78	11	1	1	9
21	Banjarmasin	117	20	7	4	9
22	Samarinda	134	9	4	2	3
23	Manado	104	27	9	9	9
24	Palu	64	11	6	2	3
25	Makassar	192	46	14	10	22
26	Kendari	160	37	15	8	14
27	Gorontalo	23	8	3	1	4
28	Ambon	37	10	4	1	5
29	Maluku Utara	25	5	3	2	0
30	Jayapura	74	12	7	5	0
31	Kepulauan Riau	98	4	3	0	1
32	Kalimantan Utara	42	6	4	1	1
33	Sulawesi Barat	29	9	8	0	1
34	Papua Barat	49	13	11	0	2
Total		4,960	996	424	173	399

Tabel 2.21 Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Anak

f. Jumlah Perkara Lalu Lintas

No	Pengadilan Tinggi	Jumlah Perkara Lalulintas	Denda
1	Banda Aceh	32,237	2,239,984,790
2	Medan	125,517	10,583,684,438
3	Padang	33,185	3,199,761,900
4	Riau	48,645	4,402,385,543
5	Jambi	23,414	2,722,023,139
6	Palembang	62,790	8,100,279,200
7	Bengkulu	20,510	2,623,565,000
8	Tanjung Karang	31,489	2,646,899,719
9	Bangka Belitung	25,505	1,547,362,047
10	Jakarta	353,087	56,379,604,958
11	Bandung	221,299	17,732,485,075
12	Semarang	269,140	23,488,193,540
13	Yogyakarta	95,321	8,619,340,000
14	Surabaya	320,238	29,454,857,761
15	Banten	62,437	5,327,347,900
16	Denpasar	39,849	4,347,473,000
17	Mataram	42,540	5,182,163,502
18	Kupang	10,440	1,286,683,199
19	Pontianak	8,514	1,624,151,000
20	Palangkaraya	13,220	2,005,666,973
21	Banjarmasin	21,759	2,612,233,498
22	Samarinda	23,068	3,015,378,060
23	Manado	26,798	3,091,885,458
24	Palu	25,549	1,911,228,049
25	Makassar	46,089	7,180,156,149
26	Kendari	12,737	1,315,904,003
27	Gorontalo	8,974	733,076,001
28	Ambon	7,136	897,569,890
29	Maluku Utara	17,490	1,674,581,500
30	Jayapura	8,695	1,189,309,000
31	Kepulauan Riau	9,451	1,231,684,000
32	Kalimantan Utara	3,531	603,001,000
33	Sulawesi Barat	10,289	927,015,240
34	Papua Barat	2,529	434,176,745
Total		2,063,472	220,331,111,277

Tabel 2.22 Perkara Lalu Lintas

A.4 Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Perdata															
		Gugatan		Permohonan		Bantahan		Gugatan Sederhana		Kepailitan		PKPU		HKI		PHI	
		e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual	e-Court	Manual
1	Banda Aceh	285	0	2,035	0	13	0	28	0	0	0	0	0	0	0	14	0
2	Medan	3,357	33	3,899	118	121	0	335	3	9	0	31	0	7	0	278	0
3	Padang	638	2	1,145	1	30	0	201	0	0	0	0	0	0	0	31	0
4	Riau	1,025	0	1,089	1	25	0	286	0	0	0	0	0	0	0	149	0
5	Jambi	490	0	436	0	16	0	244	0	0	0	0	0	0	0	26	0
6	Palembang	614	1	871	7	18	0	716	0	0	0	0	0	0	0	102	0
7	Bengkulu	108	0	354	16	2	0	100	0	0	0	0	0	0	0	3	0
8	Tanjung Karang	664	0	1,027	1	21	0	306	0	0	0	0	0	0	0	34	0
9	Bangka Belitung	227	0	361	0	3	0	58	0	0	0	0	0	0	0	35	0
10	Jakarta	4,701	2	5,139	17	159	0	245	0	49	0	389	3	122	2	351	0
11	Bandung	3,715	7	6,969	10	149	1	1,330	0	0	0	0	0	0	0	205	39
12	Semarang	3,110	0	6,339	25	104	1	2,808	0	14	0	35	0	5	0	82	0
13	Yogyakarta	652	0	2,966	0	19	0	195	0	0	0	66	0	0	0	34	0
14	Surabaya	4,209	4	10,422	5	176	1	1,822	0	17	0	0	0	11	0	157	0
15	Banten	1,748	7	2,534	3	25	1	296	0	0	0	0	0	0	0	109	0
16	Denpasar	4,283	0	2,104	0	51	0	100	0	0	0	0	0	0	0	23	0
17	Mataram	744	0	907	15	43	0	175	0	0	0	0	0	0	0	7	0
18	Kupang	913	0	2,400	1	17	0	157	0	0	0	0	0	0	0	8	0
19	Pontianak	923	0	1,891	0	9	0	167	0	0	0	0	0	0	0	59	0
20	Palangkaraya	669	0	648	0	7	0	160	0	0	0	0	0	0	0	11	0
21	Banjarmasin	474	0	1,109	0	4	0	458	0	0	0	0	0	0	0	22	0
22	Samarinda	1,042	0	1,288	0	28	0	277	0	0	0	0	0	0	0	68	0
23	Manado	2,403	0	2,092	3	26	0	172	0	0	0	0	0	0	0	18	0
24	Palu	571	13	244	6	3	0	169	0	0	0	14	0	1	0	18	1
25	Makassar	1,503	1	2,757	35	68	1	193	0	3	0	0	0	0	0	39	0
26	Kendari	264	0	370	0	6	0	55	0	0	0	0	0	0	0	12	0
27	Gorontalo	156	0	174	0	12	0	87	0	0	0	0	0	0	0	12	0
28	Ambon	520	4	466	9	8	0	46	0	0	0	0	0	0	0	11	0
29	Maluku Utara	249	0	346	0	5	0	44	0	0	0	0	0	0	0	4	0
30	Jayapura	585	4	1,463	6	6	0	270	0	0	0	0	0	0	0	12	0
31	Kepulauan Riau	603	2	819	0	15	0	72	0	0	0	0	0	0	0	48	0
32	Kalimantan Utara	138	0	271	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	149	0	210	0	2	0	27	0	0	0	0	0	0	0	7	0
34	Papua Barat	231	0	343	30	3	0	72	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Total		41,963	80	65,488	310	1,194	5	11,702	3	92	0	535	3	146	2	1,991	40

Tabel 2.23 Statistik E-Court

B. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi

B.1 Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tinggi

- Sisa Perkara Tahun 2023	:	665	Perkara
- Perkara Masuk	:	8,167	Perkara
- Beban	:	8,832	Perkara
- Perkara Putus	:	8,323	Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2024	:	509	Perkara

Tabel 2.24 Perkara Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara yang masuk tahun 2024 sebanyak 8.167 perkara dimana sisa perkara tahun 2023 sebanyak 665 perkara dengan beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 8.832 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2024 berhasil diputus sebanyak 8.323 maka persentase penyelesaian perkara tahun 2024 sebesar 94%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 86 %, pada tahun 2024 persentase penyelesaian perkara naik sebesar 8% dari tahun sebelumnya.

B.2 Jumlah Perkara Pidana Pengadilan Tinggi

- Sisa Perkara Tahun 2023	:	994	Perkara
- Perkara Masuk	:	15,837	Perkara
- Beban	:	16,831	Perkara
- Perkara Putus	:	15,768	Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2024	:	1,063	Perkara

Tabel 2.25 Perkara Pidana Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara yang masuk tahun 2024 sebanyak 15.837 perkara dimana sisa perkara tahun 2023 sebanyak 994 perkara dengan beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 16.831 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2024 berhasil diputus sebanyak 15.768 maka persentase penyelesaian perkara tahun 2024 sebesar 93 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 90 %, pada tahun 2024 persentase penyelesaian perkara naik sebesar 3 %.

3. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan

A. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri

A.1 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

No	Pengadilan Tinggi	Gugatan		Permohonan		Gugatan Sederhana		Perlawanan/Bantahan	
		<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan	<=25 Hari Kerja	>25 Hari Kerja	<5 Bulan	>5 Bulan
1	Banda Aceh	118	0	2,046	0	7	21	15	2
2	Medan	670	1	3,997	0	67	255	59	31
3	Padang	248	0	1,153	0	43	154	21	17
4	Riau	199	0	1,096	0	60	203	20	5
5	Jambi	150	1	435	0	84	166	10	4
6	Palembang	128	0	839	0	191	488	8	7
7	Bengkulu	32	0	380	0	47	78	2	2
8	Tanjung Karang	111	0	1,018	0	109	180	16	5
9	Bangka Belitung	24	0	307	0	19	25	1	0
10	Jakarta	1,492	3	5,205	13	49	178	63	68
11	Bandung	758	0	7,115	0	344	876	79	64
12	Semarang	588	0	6,124	7	811	1,790	78	11
13	Yogyakarta	124	0	3,009	5	73	112	10	7
14	Surabaya	947	3	10,327	7	593	1,097	99	60
15	Banten	270	1	2,379	1	40	226	13	20
16	Denpasar	290	1	1,910	0	31	61	30	24
17	Mataram	169	1	937	0	35	114	32	15
18	Kupang	198	0	2,426	0	56	178	6	7
19	Pontianak	110	1	2,083	0	56	74	5	6
20	Palangkaraya	88	0	629	0	32	101	5	5
21	Banjarmasin	100	0	1,219	0	214	281	2	0
22	Samarinda	245	1	1,256	0	78	176	17	9
23	Manado	195	0	2,059	0	28	130	18	12
24	Palu	98	0	241	0	45	138	3	0
25	Makassar	431	0	2,589	0	40	133	43	18
26	Kendari	97	0	426	0	8	51	4	0
27	Gorontalo	58	0	162	0	12	76	9	2
28	Ambon	94	0	472	0	6	30	5	4
29	Maluku Utara	45	0	345	0	10	24	3	0
30	Jayapura	68	0	1,482	0	45	102	5	4
31	Kepulauan Riau	78	1	785	0	26	45	12	5
32	Kalimantan Utara	21	0	267	0	9	16	0	0
33	Sulawesi Barat	32	0	194	0	13	11	4	1
34	Papua Barat	33	0	395	0	14	46	3	3
Total		8,309	14	65,307	33	3,295	7,636	700	418

Tabel 2.26 Rerata Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri

A.2 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Khusus

No	Pengadilan Tinggi	Kepailitan		Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)		Hak Kekayaan Intelektual (HKI)		Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	
		<= 60 Hari Kerja	>60 Hari Kerja	<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan	<= 50 Hari Kerja	> 50 Hari Kerja
1	Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	17	0
2	Medan	8	0	25	6	4	0	248	50
3	Padang	0	0	0	0	0	0	32	2
4	Riau	0	0	0	0	0	0	124	5
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	30	2
6	Palembang	0	0	0	0	0	0	111	23
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	4	0
8	Tanjung Karang	0	0	0	0	0	0	12	9
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	23	0
10	Jakarta	49	0	343	62	102	16	246	116
11	Bandung	0	0	0	0	0	0	227	15
12	Semarang	14	0	32	4	8	0	62	21
13	Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	18	9
14	Surabaya	13	0	57	11	6	0	94	23
15	Banten	0	0	0	0	0	0	62	37
16	Denpasar	0	0	0	0	0	0	21	0
17	Mataram	0	0	0	0	0	0	7	0
18	Kupang	0	0	0	0	0	0	6	4
19	Pontianak	0	0	0	0	0	0	53	3
20	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	15	3
21	Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	18	1
22	Samarinda	0	0	0	0	0	0	52	6
23	Manado	0	0	0	0	0	0	11	5
24	Palu	0	0	0	0	0	0	16	1
25	Makassar	6	0	10	2	1	0	33	0
26	Kendari	0	0	0	0	0	0	13	0
27	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	9	9
28	Ambon	0	0	0	0	0	0	10	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	23	0
30	Jayapura	0	0	0	0	0	0	33	0
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	23	1
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	5	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	4
Total		90	0	467	85	121	16	1,658	346

Tabel 2.27 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Khusus

A.3 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

a. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

No	Pengadilan Tinggi	Pidana		Pidana Biasa		Pidana Singkat		Pidana Cepat	
		<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan	<5 Bulan	>5 Bulan
1	Banda Aceh	2,805	0	2,805	0	146	0	141	0
2	Medan	11,785	17	11,785	17	1441	0	1,442	0
3	Padang	3,155	11	3,155	11	384	0	379	0
4	Riau	6,299	12	6,299	12	1164	0	1,105	0
5	Jambi	2,344	2	2,344	2	410	0	409	0
6	Palembang	4,194	0	4,194	0	208	0	208	0
7	Bengkulu	1,438	0	1,438	0	106	0	106	0
8	Tanjung Karang	4,186	4	4,186	4	68	0	68	0
9	Bangka Belitung	1,314	0	1,314	0	14	0	14	0
10	Jakarta	4,616	36	4,616	36	1301	0	1,301	0
11	Bandung	9,489	26	9,489	26	632	0	632	0
12	Semarang	6,807	3	6,807	3	1289	0	1,268	0
13	Yogyakarta	1,889	1	1,889	1	374	0	374	0
14	Surabaya	11,648	3	11,648	3	4481	0	4,399	0
15	Banten	3,505	7	3,505	7	325	0	323	0
16	Denpasar	1,964	4	1,964	4	186	0	186	0
17	Mataram	2,373	2	2,373	2	89	0	87	0
18	Kupang	1,317	2	1,317	2	24	0	24	0
19	Pontianak	3,250	2	3,250	2	215	0	215	0
20	Palangkaraya	2,381	1	2,381	1	90	0	90	0
21	Banjarmasin	3,453	1	3,453	1	345	0	345	0
22	Samarinda	4,419	3	4,419	3	194	0	194	0
23	Manado	1,564	16	1,564	16	85	0	83	0
24	Palu	1,771	5	1,771	5	22	0	22	0
25	Makassar	3,610	0	3,610	0	165	0	164	0
26	Kendari	1,494	0	1,494	0	25	0	25	0
27	Gorontalo	585	0	585	0	21	0	20	0
28	Ambon	865	0	865	0	86	0	86	0
29	Maluku Utara	493	0	493	0	136	0	136	0
30	Jayapura	1,138	2	1,138	2	178	0	178	0
31	Kepulauan Riau	1,541	2	1,541	2	64	0	64	0
32	Kalimantan Utara	1,009	3	1,009	3	29	0	20	0
33	Sulawesi Barat	729	0	729	0	14	0	14	0
34	Papua Barat	705	0	705	0	12	0	12	0
Total		110,135	165	110,135	165	14,323	0	14,134	0

Tabel 2.28 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

b. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus

No	Pengadilan Tinggi	Pidana Anak		Tindak Pidana korupsi (Tipikor)		Perikanan		Pidana Praperadilan	
		<5 Bulan	>5 Bulan	<=120 Hari	>120 Hari	<=30 Hari	>30 Hari	<5 Bulan	>5 Bulan
1	Banda Aceh	48	0	76	1	0	0	16	0
2	Medan	493	0	165	0	1	0	202	0
3	Padang	147	0	59	1	0	0	1	0
4	Riau	185	0	73	1	0	0	38	0
5	Jambi	121	0	63	0	0	0	20	0
6	Palembang	227	0	65	0	6	1	50	0
7	Bengkulu	154	0	61	0	0	0	20	0
8	Tanjung Karang	290	0	52	0	0	0	19	0
9	Bangka Belitung	74	0	19	0	0	0	17	0
10	Jakarta	102	0	117	7	2	0	189	0
11	Bandung	427	0	98	0	0	0	134	0
12	Semarang	377	0	100	0	0	0	71	0
13	Yogyakarta	81	0	18	0	0	0	22	0
14	Surabaya	445	0	145	0	0	0	102	0
15	Banten	139	0	43	3	0	0	49	0
16	Denpasar	50	0	36	0	0	0	35	0
17	Mataram	107	0	41	0	2	0	42	0
18	Kupang	78	0	71	0	0	0	39	0
19	Pontianak	132	0	50	1	2	0	36	0
20	Palangkaraya	79	0	47	0	0	0	28	0
21	Banjarmasin	122	1	34	0	0	0	11	0
22	Samarinda	137	1	63	1	0	0	19	0
23	Manado	100	1	54	0	22	0	37	0
24	Palu	62	0	55	0	0	0	46	0
25	Makassar	191	0	127	1	0	0	63	0
26	Kendari	153	0	55	0	0	0	22	0
27	Gorontalo	24	0	14	0	0	0	32	0
28	Ambon	36	0	73	0	6	0	31	0
29	Maluku Utara	23	0	42	0	3	0	13	0
30	Jayapura	73	0	17	17	0	0	7	0
31	Kepulauan Riau	96	0	37	0	12	0	35	0
32	Kalimantan Utara	41	0	0	0	0	0	9	0
33	Sulawesi Barat	30	0	35	0	0	0	6	0
34	Papua Barat	49	0	29	2	2	0	14	0
Total		4,893	3	2,034	35	58	1	1,475	0

Tabel 2.29 Rerata Waktu Perkara Pidana Khusus

B. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi

B.1 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

No	Pengadilan Tinggi	Gugatan		Perlawanan/Bantahan	
		<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan
1	Banda Aceh	118	0	8	0
2	Medan	670	1	41	0
3	Padang	248	0	12	0
4	Riau	198	1	12	0
5	Jambi	150	1	4	0
6	Palembang	127	1	8	0
7	Bengkulu	32	0	1	0
8	Tanjung Karang	111	0	12	0
9	Bangka Belitung	24	0	0	0
10	Jakarta	1,492	3	68	0
11	Bandung	756	2	67	0
12	Semarang	588	0	47	0
13	Yogyakarta	123	1	9	0
14	Surabaya	943	7	75	0
15	Banten	268	3	13	0
16	Denpasar	290	1	18	0
17	Mataram	169	1	21	0
18	Kupang	197	1	9	0
19	Pontianak	109	2	10	0
20	Palangkaraya	88	0	6	0
21	Banjarmasin	100	0	0	0
22	Samarinda	245	1	16	0
23	Manado	195	0	12	0
24	Palu	98	0	4	0
25	Makassar	431	0	39	0
26	Kendari	97	0	2	0
27	Gorontalo	58	0	4	0
28	Ambon	94	0	5	0
29	Maluku Utara	45	0	1	0
30	Jayapura	68	0	5	0
31	Kepulauan Riau	0	0	7	0
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	0	3	0
34	Papua Barat	0	0	0	0
Total		8,132	26	539	0

Tabel 2.30 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Tinggi

B.2 Rerata Waktu penyelesaian Perkara Pidana

No	Pengadilan Tinggi	Pidana Biasa		Pidana Singkat		Pidana Cepat	
		<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan
1	Banda Aceh	587	0	0	0	2	0
2	Medan	2,481	0	5	0	18	0
3	Padang	543	0	1	0	5	0
4	Riau	865	1	0	0	2	0
5	Jambi	372	0	1	0	0	0
6	Palembang	424	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	353	0	2	0	0	0
8	Tanjung Karang	397	0	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	95	0	0	0	1	0
10	Jakarta	348	2	0	0	0	0
11	Bandung	474	0	0	0	0	0
12	Semarang	1,101	0	0	0	4	0
13	Yogyakarta	144	0	0	0	0	0
14	Surabaya	1,768	0	0	0	5	0
15	Banten	181	0	0	0	0	0
16	Denpasar	121	0	0	0	1	0
17	Mataram	262	0	1	0	6	0
18	Kupang	183	0	0	0	0	0
19	Pontianak	553	0	0	0	4	0
20	Palangkaraya	261	0	0	0	0	0
21	Banjarmasin	392	0	0	0	0	0
22	Samarinda	450	0	0	0	0	0
23	Manado	160	0	0	0	0	0
24	Palu	255	0	0	0	0	0
25	Makassar	1,577	0	2	0	1	0
26	Kendari	177	1	0	0	1	0
27	Gorontalo	146	0	0	0	0	0
28	Ambon	181	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	74	0	0	0	1	0
30	Jayapura	154	0	0	0	0	0
31	Kepulauan Riau	278	0	0	0	0	0
32	Kalimantan Utara	72	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	275	0	1	0	0	0
34	Papua Barat	59	0	0	0	0	0
Total		15,763	4	13	0	51	0

Tabel 2.31 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Pada Pengadilan Tinggi

B.3 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus

No	Pengadilan Tinggi	Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)		Perikanan		Anak	
		<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan	<3 Bulan	>3 Bulan
1	Banda Aceh	49	0		0	6	0
2	Medan	48	0	0	0	84	0
3	Padang	29	0	0	0	16	0
4	Riau	18	0	0	0	28	0
5	Jambi	30	0	0	0	10	0
6	Palembang	27	0	1	0	16	0
7	Bengkulu	15	0	0	0	27	0
8	Tanjung Karang	10	0	0	0	23	0
9	Bangka Belitung	14	0	0	0	8	0
10	Jakarta	64	0	0	0	11	0
11	Bandung	38	0	0	0	51	0
12	Semarang	34	0	0	0	34	0
13	Yogyakarta	10	0	0	0	2	0
14	Surabaya	66	0	0	0	47	0
15	Banten	27	0	0	0	10	0
16	Denpasar	14	0	0	0	1	0
17	Mataram	28	0	0	0	11	0
18	Kupang	35	0	0	0	9	0
19	Pontianak	12	0	0	0	15	0
20	Palangkaraya	16	0	0	0	7	0
21	Banjarmasin	14	0	0	0	9	0
22	Samarinda	21	0	0	0	6	0
23	Manado	15	0	2	0	9	0
24	Palu	39	0	0	0	7	0
25	Makassar	65	0	0	0	23	0
26	Kendari	27	0	0	0	16	0
27	Gorontalo	11	0	0	0	6	0
28	Ambon	25	0	3	0	4	0
29	Maluku Utara	15	0	2	0	2	0
30	Jayapura	3	0	0	0	9	0
31	Kepulauan Riau	21	0	1	0	11	0
32	Kalimantan Utara	0	0	0	0	2	0
33	Sulawesi Barat	13	0	0	0	5	0
34	Papua Barat	19	0	0	0	2	0
Total		872	0	9	0	527	0

Tabel 2.32 Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi

4. Capaian Prioritas Nasional

A. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum yang membutuhkan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemanfatan posbakum di pengadilan setiap tahun ada peningkatan dan penurunan jumlah layanan. Berikut rincian rekapitulasi bulanan laporan posbakum di pengadilan tahun 2024:

NO	Bulan	Jenis Layanan			Laki-laki		Perempuan	
		Informasi/Konsultasi/Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Info Organisasi bantuan Hukum	Difabel	Non	Difabel	Non
1	Januari	5,005	1,868	716	3	3,343	1	3,048
2	Februari	5,083	1,733	717	1	3,424	1	2,988
3	Maret	5,132	1,764	697	0	3,381	0	2,995
4	April	4,400	1,485	649	1	3,070	0	2,468
5	Mei	5,576	2,009	687	2	3,762	1	3,326
6	Juni	5,474	1,985	705	4	3,527	0	3,243
7	Juli	6,607	2,329	769	1	4,179	0	3,800
8	Agustus	6,146	2,071	877	1	3,742	2	3,588
9	September	5,399	1,736	861	2	3,427	2	3,282
10	Oktober	6,083	1,893	762	0	3,706	2	3,474
11	November	5,069	1,748	730	4	3,241	1	3,057
12	Desember	4,457	1,490	605	0	2,703	1	2,581
Jumlah		64,431	22,111	8,775	19	41,505	11	37,850
Total		95,317			79,385			

Tabel 2.33 Posbakum

Jenis layanan pada Posbakum tahun 2024 berjumlah 95.317 layanan dengan jumlah orang yang dilayani sebanyak 79.385 orang, Alokasi anggaran Posbakum untuk 382 satuan kerja pengadilan sebesar Rp. 13.134.500.000,- (tiga belas milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) realisasi sebesar 13.096.022.217,- (tiga belas milyar sembilan puluh enam dua puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

B. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dengan pertimbangan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dengan kriteria sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, akta kelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;
2. Apabila fasilitas gedung sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*) tidak layak dan kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan di tempat tersebut, maka ketua Pengadilan diminta dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau instansi lain untuk menyediakan tempat/ruangan yang layak untuk sidang.
3. Sidang di luar gedung Pengadilan yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat menggunakan atribut persidangan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan baik yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat. Pengawasan melekat yang dimaksud meliputi pencatatanya pada SIPP, penggunaan

- alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan serta laporan pelaksanaan melalui pelaporan elektronik;
5. Apabila diperlukan, dalam pelaksanaannya sidang diluar gedung Pengadilan dapat sertakan dengan pelayanan posbakum dan mediasi;
 6. Ketua Pengadilan Tinggi melalui hakim pengawas daerah yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan per tri wulan.

Berikut adalah data Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2024:

No	Bulan	Perdata								Pidana							
		Gugatan	Pemohonan	Kepailitan	PKPU	HKI	PHI	Perlawanan/Bantahan	Gugatan Sederhana	Pidana Singkat	Pidana Cepat	Tipikor	Petikanan	HAM	Pidana Anak	Praperadilan	
1	Januari	24	53	0	0	0	1	1	0	507	0	10	0	0	0	12	0
2	Februari	18	64	0	0	0	0	1	1	272	0	8	0	0	0	21	0
3	Maret	20	177	0	0	0	0	0	2	172	0	65	0	0	0	11	0
4	April	5	65	0	0	0	0	0	0	198	0	8	0	0	0	11	0
5	Mei	33	160	0	0	0	0	0	2	254	0	44	0	0	0	14	1
6	Juni	32	222	0	0	0	0	1	6	315	0	80	0	0	0	17	0
7	Juli	11	232	0	0	0	0	0	4	380	1	118	0	3	0	14	1
8	Agustus	13	181	0	0	0	0	0	7	422	0	82	0	0	0	6	0
9	September	8	177	0	0	0	0	0	7	306	0	45	0	0	0	5	0
10	Oktober	47	251	0	0	0	0	0	2	289	0	231	0	0	0	13	0
11	November	47	173	0	0	0	0	1	0	196	1	39	0	0	0	23	2
12	Desember	27	185	0	0	0	0	0	2	247	0	14	0	0	0	7	0
Total		285	1,949	0	0	0	1	4	33	3,558	2	764	0	3	0	154	4
Jumlah		2,272								4,485							
Jumlah Keleluhan										4,485							

Tabel 2.34 Sidang Diluar Gedung

Jumlah sidang diluar gedung pada Pengadilan Tahun 2024 sebanyak 6.757 data. Untuk Pengadilan yang melakukan sidang diluar gedung sebanyak 135 Pengadilan Negeri dengan Realisasi 7.979.841.242,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

C. Pembebasan Biaya Perkara

Perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara biasa di peruntukan bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma, baik melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni seperti yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014. Berikut data pembebasan biaya perkara tahun 2024.

No	Bulan	Jenis		Pemohon			Jenis Perkara					
		DIPA	Murni	Laki-Laki	Perempuan	Badan Hukum	Perdata Gugatan	Perdata Gugatan Sederhana	Kepailitan	PHI	Perdata Perlawanan	Perdata Permohonan
1	Januari	18	0	28	16	2	4	0	0	17	0	14
2	Februari	24	1	45	17	3	4	0	0	21	0	22
3	Maret	49	0	46	29	3	13	0	0	20	0	37
4	April	26	0	50	27	1	4	0	0	22	0	22
5	Mei	90	0	78	55	1	20	0		22	0	71
6	Juni	92	0	64	57	6	16	1	0	26	0	75
7	Juli	180	4	122	162	2	37	2	0	51	0	145
8	Agustus	157	2	130	111	2	26	0	0	44	0	133
9	September	110	2	108	92	2	22	1	0	40	0	88
10	Oktober	200	1	131	129	2	33	3	0	17	0	165
11	November	143	1	96	87	1	23	0	0	26	0	121
12	Desember	119	10	66	85	0	13	0	0	5	0	114
Jumlah		1,208	21	964	867	25	215	7	0	311	0	1,007
Total		1,229		1,856			1,540					

Tabel 2.35 Pembebasan Biaya Perkara

Jumlah pengadilan pemberi layanan tahun 2024 untuk Jenis sebanyak 1.229 Perkara, pemohon sebanyak 1.856 Orang dan untuk jenis perkara sebanyak 1.540. Untuk Pengadilan yang memberi Layanan Sebanyak 220 Pengadilan Negeri dengan Realisasi sebanyak 220.849.845,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

D. Restorative Justice

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemilahan dan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku.

Korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulih kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penerapan Restorative Justice sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan seperti peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. Penyelesaian perkara yang bisa melalui keadilan restorative (*restorative justice*) seperti tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Berikut data *Restorative Justice* :

No	Pengadilan Tinggi	Jumlah Perkara
1	Banda Aceh	59
2	Medan	409
3	Padang	12
4	Riau	3
5	Jambi	34
6	Palembang	51
7	Bengkulu	17
8	Tanjung Karang	43
9	Bangka Belitung	17
10	Jakarta	35
11	Bandung	46
12	Semarang	79
13	Yogyakarta	37
14	Surabaya	124
15	Banten	8
16	Denpasar	122
17	Mataram	28
18	Kupang	7
19	Pontianak	6
20	Palangkaraya	28
21	Banjarmasin	88
22	Samarinda	1
23	Manado	6
24	Palu	57
25	Makassar	46
26	Kendari	21
27	Gorontalo	13
28	Ambon	8
29	Maluku Utara	10
30	Jayapura	18
31	Kepulauan Riau	1
32	Kalimantan Utara	3
33	Sulawesi Barat	0
34	Papua Barat	2
Total		1,439

Tabel 2.36 Restorative Justice

E. Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Dalam proses hukum, perempuan berhadapan dengan hukum sering mengalami hambatan dan diskriminasi. Untuk mengatasi hal ini maka Mahkamah Agung Mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). diadakan bimbingan ini guna perempuan sering mengalami permasalahan seperti perlakuan tidak setara yang menyebabkan diskriminasi, perlakuan yang menyudutkan, menjerat, pelecehan, mendapat tekanan secara psikologis dan sosial dalam hal ini dengan adanya pendamping bagi perempuan saat berhadapan dengan hukum agar mendapatkan rasa aman dan nyaman sehingga membantu kelancaran persidangan. sehingga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu memberikan bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum agar aparat peradilan dan perempuan berhadapan dengan hukum bisa lebih memahami kondisi tersebut, tetapi dalam hal ini bukan memberi keistimewaan atau perlakuan khusus bagi perempuan berhadapan dengan hukum dan bukan untuk mengistimewakan, namun memberikan kesetaraan bagi perempuan sebagai kalangan rentan yang sering terdiskriminasi. Tahun 2024 sudah melaksanakan sebanyak 5 kali bimbingan teknis dengan peserta 299 orang.

5. Penghargaan Pengadilan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1158/DJU/SK.KP3.4.4/XII/2024 Tentang Penetapan Penghargaan Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan penghargaan kepada pengadilan sebagai bentuk apresiasi dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat, berikut rincian penghargaan:

A. Penghargaan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)

Kategori Penilaian pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 168/DJU/TI1.1/VIII/2024 tentang Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi dan yang belum mencapai standar nilai EIS periode Agustus Tahun 2024, berdasarkan jumlah beban perkara, dan juga daftar pengadilan yang belum mencapai standar minimal Nilai Evaluasi Implementasi SIPP untuk menerapkan registrasi elektronik.

1. Perolehan nilai maksimal pada setiap unsur tidak ada perbedaan di setiap kelas pengadilan;
2. perubahan cara penilaian dengan melakukan konversi kedalam bentuk persentase pada setiap kriteria, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengukuran dalam pelaksanaan Implementasi SIPP pada pengadilan Negeri;
3. terdapat unsur wajib/tidak dalam penilaian, dimana hal ini dimaksud untuk memberikan kesempatan pada pengadilan untuk dapat bersaing secara adil dalam peroleh presentase implementasi aplikasi SIPP. Unsur tidak wajib akan menjadi pembagi dalam penilaian jika terdapat aktifitas penginputan akan tetapi jika pada periode tertentu tidak terdapat aktivitas penginputan akan tetapi jika pada periode tertentu tidak terdapat aktivitas penginputan maka unsur tersebut tidak menjadi unsur pembagi.

Penghargaan Evaluasi Implementasi Sistem Informasi penelusuran perkara Tahun 2024 (berdasarkan SK 1158/DJU/SK.KP3.4.4/XII/2024) diberikan kepada :

a. Pengadilan Tinggi

No	Klasifikasi	Pengadilan Tinggi	Kategori
1.	I.	Jawa Tengah	Kategori lebih dari 1000 perkara
2.	II.	Surabaya	

No	Klasifikasi	Pengadilan Tinggi	Kategori
3.	III.	Makassar	
4.	IV.	Medan	
5.	V.	Bandung	

No	Klasifikasi	Pengadilan Tinggi	Kategori
1.	I.	Jambi	Jumlah Perkara 301 s/d 1000 perkara
2.	II.	Palembang	
3.	III.	Banjarmasin	
4.	IV.	Tanjungkarang	
5.	V.	Pontianak	

No	Klasifikasi	Pengadilan Tinggi	Kategori
1.	I.	Gorontalo	Jumlah Perkara 1 s/d 300 perkara
2.	II.	Yogyakarta	
3.	III.	Bangka Belitung	
4.	IV.	Palangkaraya	
5.	V.	Sulawesi Tenggara	

b. Pengadilan Negeri Klas IA Khusus

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Palembang	
2.	II.	Surakarta	
3.	III.	Sidoarjo	
4.	IV.	Jakarta Utara	
5.	V.	Bekasi	
6.	VI.	Jakarta Selatan	
7.	VII.	Surabaya	
8.	VIII.	Semarang	
9.	IX.	Tangerang	
10.	X.	Jakarta Pusat	

c. Pengadilan Negeri Kelas IA

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Klaten	Kategori Perkara 1 s/d 1000
2.	II.	Tasikmalaya	
3.	III.	Cilacap	
4.	IV.	Lubuk Linggau	
5.	V.	Sragen	

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Kabupaten Kediri	Kategori Perkara 1001 s/d 2000
2.	II.	Yogyakarta	
3.	III.	Banjarmasin	
4.	IV.	Mataram	
5.	V.	Bengkulu	

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Malang	Kategori diatas 2000 Perkara
2.	II.	Pekanbaru	
3.	III.	Mojokerto	
4.	IV.	Cibinong	
5.	V.	Bale Bandung	

d. Pengadilan Negeri Kelas IB

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Bojonegoro	Kategori diatas 1000 Perkara
2.	II.	Rantau Prapat	
3.	III.	Baturaja	
4.	IV.	Karawang	
5.	V.	Tuban	
6.	VI.	Jombang	
7.	VII.	Sekayu	
8.	VIII.	Stabat	
9.	IX.	Bangil	
10.	X.	Tondano	

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Kalianda	Kategori Perkara 501 s/d 1000
2.	II.	Banjarbaru	
3.	III.	Gunung Sugih	
4.	IV.	Subang	
5.	V.	Metro	
6.	VI.	Jepara	
7.	VII.	Maros	
8.	VIII.	Madiun	
9.	IX.	Ponorogo	
10.	X.	Purwokerto	

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Curup	Kategori Perkara 1 s/d 500
2.	II.	Kandangan	
3.	III.	Wates	
4.	IV.	Lhokseumawe	
5.	V.	Martapura	
6.	VI.	Purbalingga	
7.	VII.	Wonogiri	
8.	VIII.	Kolaka	
9.	IX.	Tanjung Selor	
10.	X.	Brebes	

e. Pengadilan Negeri Kelas II

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Pangkalan Balai	Kategori 501 s/d 1000 Perkara
2.	II.	Lahat	
3.	III.	Polewali	
4.	IV.	Manggala	
5.	V.	Sukadana	
6.	VI.	Magetan	
7.	VII.	Trenggalek	
8.	VIII.	Rengat/Indragiri	
9.	IX.	Bangkalan	
10.	X.	Pangkajene	

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri	Kategori
1.	I.	Tanjung Redep	Kategori 1 s/d 500 Perkara
2.	II.	Tanah Grogot	
3.	III.	Tual	
4.	IV.	Kutai Barat	
5.	V.	Tilamuta	
6.	VI.	Buntok	
7.	VII.	Paringin	
8.	VIII.	Buol	
9.	IX.	Wonosari	
10.	X.	Sengeti	

Tabel 2.37 Penghargaan SIPP

B. Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. diperlukan pengelola layanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pengelola layanan informasi adalah pejabat pengelola informasi Dokumentasi (PPID), penanggungjawab informasi dan petugas informasi.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 diberikan kepada:

a. Pengadilan Tinggi

No	Klasifikasi	Pengadilan Tinggi
1.	I.	Riau
2.	II.	Ambon
3.	III.	Sulawesi Tengah
4.	IV.	Banjarmasin
5.	V.	Banda Aceh
6.	VI.	Bengkulu

b. Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Jakarta Timur
2.	II.	Jakarta Pusat
3.	III.	Jakarta Utara
4.	IV.	Surakarta

c. Pengadilan Negeri Kelas IA

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Pati
2.	II.	Banjarmasin
3.	III.	Mataram
4.	IV.	Yogyakarta
5.	V.	Bengkulu
6.	VI.	Pekanbaru

d. Pengadilan Negeri Kelas IB dan II

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Magelang
2.	II.	Bengkalis
3.	III.	Singaraja
4.	IV.	Kediri
5.	V.	Martapura
6.	VI.	Wonosari
7.	VII.	Masohi
8.	VIII.	Masamba
9.	IX.	Curup
10.	X.	Waikabubak

Tabel 2. 38 Penghargaan Keterbukaan Informasi (KIP)

C. Penghargaan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum

Penilaian pelaksanaan Pos Bantuan Hukum meliputi :

1. Inovasi yang dilaksanakan Posbakum
2. Publikasi dan sosialisasi
3. Proses seleksi Organisasi Bantuan Hukum pada Posbakum

4. Pembinaan Posbakum oleh Panitera Muda Hukum
 5. Laporan dan Monitoring Evaluasi
 6. Pemahaman petugas Posbakum dan aparat pengadilan terkait (Ketua, Panitera, Panitera Muda)
- Penghargaan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum tahun 2024 diberikan kepada :

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Batulicin
2.	II.	Sleman
3.	III.	Manado
4.	IV.	Bulukumba
5.	V.	Pangkalan Balai
6.	VI.	Wonosari
7.	VII.	Mataram
8.	VIII.	Gresik
9.	IX.	Pangkalan Bun

Tabel 2.39 Pemenang Lomba Posbakum

✦ D. Penghargaan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan ✦

Penilaian pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan meliputi :

1. Inovasi yang dilaksanakan Posbakum
2. Publikasi dan sosialisasi
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
4. Perencanaan pelaksanaan dan penganggaran

Penghargaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan tahun 2024 diberikan kepada :

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Banda Aceh
2.	II.	Pare – pare
3.	III.	Semarpura
4.	IV.	Baturaja
5.	V.	Rantau Prapat

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
6.	VI.	Kepahiang

Tabel 2.40 Pemenang Lomba Sidang Diluar Gedung

E. Penghargaan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara

Penilaian pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara meliputi :

1. Inovasi yang dilaksanakan Posbakum
2. Publikasi dan sosialisasi
3. Perencanaan dan penganggaran
4. Pemahaman pelaksanaan pembebasan biaya perkara
5. Monitoring dan evaluasi

Penghargaan pelaksanaan pembebasan biaya perkara tahun 2024 diberikan kepada :

No	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	I.	Wonosari
2.	II.	Malang
3.	III.	Bulukumba

Tabel 2.41 Penghargaan Lomba Prodeo

G. Penghargaan Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara Tahun 2024

No	Jenis	Klas	Pengadilan Negeri
1.	Administrasi Perkara dan Keuangan	IA K	I. PN Surakarta
			II. PN Bandung
			III. PN Sidoarjo
			IV. PN Jakarta Barat
		IA	I. PN Tasikmalaya
			II. PN Pati
			III. PN Pangkalpinang
			IV. PN Palangkaraya
			V. PN Jember
			VI. PN Gresik
		IB dan II	I. PN Tembilahan
			II. PN Magelang
			III. PN Kuala Kapuas

No	Jenis	Klas	Pengadilan Negeri
			IV. PN Banjar
			V. PN Karawang
			VI. PN Pasangkayu
			VII. PN Banjarbaru
			VIII. PN Lhokseumawe
			IX. PN Tanjung Jabung Timur
			X. PN Langsa
			XI. PN Lumajang
			XII. PN Bangkalan

Tabel 2. 42 Penghargaan Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara

H. Penghargaan Kinerja Hakim Tinggi Pengawas Daerah

No	Jenis	Nama Hakim
1.	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	1. Andy Subiyantadi
		2. Dr. parulian Lumbantoruan, S.H., M.H
		3. Priyanto, S.H., M.Hum
		4. Sohe, S.H., M.H
		5. Sudarwin, S.H., M.H
		6. Sukri Sulumin, S.H., M.H

Tabel 2. 43 Penghargaan Kinerja Hakim Tinggi Pengawas Daerah

H. Penghargaan Role Model Pimpinan

a. Pengadilan Tinggi

No	Nama Hakim	Pengadilan Tinggi
1.	Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum	Banjarmasin
2.	Dr. H. herri Swantoro, S.H., M.H	Jakarta
3.	H. Mochamad Hatta, S.H., M.H	Jawa Tengah
4.	Nugroho Setiadji, S.H	Palembang
5.	Setyawan Hartono, S.H., M.H	Yogyakarta
6.	Dr. H. Siswandriyono, S.H., M. Hum	Riau

b. Pengadilan Negeri

No	Nama Hakim	Pengadilan Negeri
1.	Ali Sobirin, S.H., M.H	Pelaihari
2.	Elvin Andrian, S.H., M.H	Baturaja
3.	Iwan Gunawan, S.H., M.H	Mentok

No	Nama Hakim	Pengadilan Negeri
4.	Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum	Medan
5.	Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H	Pekanbaru
6.	Yohanes Fransiscus Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H	Bantul
7.	Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H	Lubuk Linggau

Tabel 2. 44 Penghargaan Role Model Pimpinan

I. Penghargaan Role Model Panitera

a. Pengadilan Tinggi

No	Nama Panitera	Pengadilan Tinggi
1.	Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H	Tanjungkarang
2.	Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H	Makassar
3.	Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H., M.H	Gorontalo
4.	H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H	Jakarta

b. Pengadilan Negeri

No	Nama Panitera	Pengadilan Negeri
1.	Ani Windarti, S.H., M.BA	Wonosobo
2.	H. Edy Rahmansyah, S.H	Banjarmasin
3.	Iyus Yusuf, S.H., M.H	Jakarta Barat
4.	Mastur, S.H., M.H	Maros
5.	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H	Denpasar
6.	Wahyu Probo Yulianto, S.H., M.H	Kepanjen

Tabel 2. 45 Penghargaan Role Model Panitera

J. Penghargaan Role Model Sekretaris

a. Pengadilan Tinggi

No	Nama Sekretaris	Pengadilan Tinggi
1.	H. Bram Fahmi, S.T., S.H., M.H	Medan
2.	Endri Novian, S.E., M.M	Padang
3.	Fatima Albaar, S.AG., M.H	Maluku Utara
4.	Rismayati, S.T., M.M	Banda Aceh
5.	Rosyidatus Syarifeini, S.Psi	Yogyakarta

No	Nama Sekretaris	Pengadilan Tinggi
6.	Sudiyanto, S.H., M.H	Jakarta
7.	DR. Yuslan, S.E., S.H., M.H	Denpasar

b. Pengadilan Negeri Kelas IA K

No	Nama Sekretaris	Pengadilan Negeri
1.	Mahfud Widi Priyono, S.T., M.H	Jakarta Selatan
2.	Nain Meitulu, S.H	Palembang
3.	Nana Rusmana, S.H., M.H	Surakarta

c. Pengadilan Negeri Kelas IA

No	Nama Sekretaris	Pengadilan Negeri
1.	Wisnu Giri Prasetyo, S.H	Tasikmalaya

d. Pengadilan Negeri Kelas IB

No	Nama Sekretaris	Pengadilan Negeri
1.	Heri Sunli Oktora, S.T	Poso
2.	I Gede Mahardika, S.H	Singaraja
3.	Immanuel Rismawati, S.E.A.K., M.Si	Bangkinang

e. Pengadilan Negeri Kelas II

No	Nama Sekretaris	Pengadilan Negeri
1.	Adri Helver Roniarta, S.E	Sorolangun
2.	Andry Kusuma Putra, S,E	Tembilahan
3.	Juang Samadi, S.Pd., M.H	Tilamuta

Tabel 2. 46 Penghargaan Role Model Sekretaris

k. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Jenis	Pengadilan Tinggi
1.	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Sakip)	1. Jakarta
		2. Riau
		3. Banda Aceh

Tabel 2. 47 Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial

- Jumlah Hakim

- a. Data Hakim Seluruh Indonesia

- Data Hakim per Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Ketua Pengadilan Tinggi	24	6
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	24	3
3	Hakim Pengadilan Tinggi	488	136
4	Hakim Tinggi Yustisial M.A.R.I	22	17
5	Hakim Tinggi Yustisial M.A.R.I/Balitbang Diklat Kumdil	7	3
6	Hakim Tinggi Yustisial Bawas M.A.R.I	24	5
7	Hakim Tinggi Yustisial pada Pengadilan Tinggi	13	7
8	Hakim Tinggi Non Palu pada Pengadilan Tinggi	-	-
9	Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus	13	2
10	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus	12	3
11	Hakim Pengadilan Negeri Klas I A khusus	347	102
12	Ketua Pengadilan Negeri Klas I A	46	7
13	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A	38	9
14	Hakim Pengadilan Negeri Klas I A	346	231
15	Ketua Pengadilan Negeri Klas I B	85	29
16	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB	87	20
17	Hakim Pengadilan Negeri Klas I B	368	184
18	Ketua Pengadilan Negeri Klas II	133	63
19	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II	82	65
20	Hakim Pengadilan Negeri Klas II	633	311
21	Hakim Yustisial M.A.R.I	79	50
22	Hakim Yustisial M.A.R.I/ Diklat Kumdil	5	5
23	Hakim Yustisial pada Sektim Bawas	19	4
24	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi	16	9
25	Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi	18	3
Total		2,929	1,274

Tabel 3.1 Hakim Pergender

– Kenaikan Pangkat Hakim

No	Bulan	Jumlah
1	Februari	10
2	April	403
3	Juni	3
4	Agustus	6
5	Oktober	176
6	Desember	1
Total		599

Tabel 3.2 Kenaikan Pangkat Hakim

– Hakim Karir

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi	138
2	Hakim Tipikor Pengadilan Negeri	172
3	Hakim Lingkungan Pengadilan Tinggi	135
4	Hakim Lingkungan Pengadilan Negeri	798
5	Hakim Niaga	35
6	Hakim PHI	93
7	Hakim Perikanan	16
8	Hakim Anak Pengadilan Tinggi	257
9	Hakim Anak Pengadilan Negeri	1,766
10	Hakim Pemilu Pengadilan Tinggi	478
11	Hakim Pemilu Pengadilan Negeri	2,961
12	Hakim HAM Pengadilan Tinggi	-
13	Hakim HAM Pengadilan Negeri	-
Total		6,849

Tabel 3.3 Hakim Karir

– Hakim Ad Hoc

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi	102
2	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri	163
3	Hakim Ad Hoc PHI	134
4	Hakim Ad Hoc Perikanan	41
5	Hakim Ad Hoc HAM Pengadilan Tinggi	4
6	Hakim Ad Hoc Ham Pengadilan Negeri	4
Total		448

Tabel 3.4 Hakim Ad Hoc

b. Promosi dan Mutasi Hakim

– Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri

- Ketua Pengadilan Negeri	187	Orang
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri	161	Orang
- Penempatan Cakim	-	Orang
- Hakim Pengadilan Negeri	477	Orang
- Hakim Yustisial MA RI/Asisten Hakim Agung/Biro Humas	12	Orang
- Hakim Yustisial MA/Bawas	-	Orang
- Hakim Yustisial MA/ Diklat	-	Orang
- Hakim Yustisial MA/Badilum	-	Orang
- Hakim Yustisial PT	4	Orang
- Hakim Non Palu (Hukdis)	3	Orang
Total	844	Orang

Tabel 3.5 Promosi dan Mutasi Hakim PN

– Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi

- Ketua Pengadilan Tinggi	9	Orang
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	21	Orang
- Hakim Pengadilan Tinggi	141	Orang
- Hakim Yustisial MA	3	Orang
- Hakim Yustisial MA/DIP Bawas	-	Orang
- Hakim Tinggi Yustisial PT	4	Orang
- Hakim Yustisial MA/Diklat	-	Orang
Total	178	Orang

Tabel 3.6 Promosi dan Mutasi Hakim PT

– Mutasi dan penempatan Hakim Ad Hoc

- Penempatan Tipikor Hakim Pengadilan Tinggi	-	Orang
- Penempatan Tipikor Hakim Pengadilan Negeri	-	Orang
- Penempatan Hakim Ad Hoc Perikanan	-	Orang
- Mutasi Hakim Ad Hoc Tipikor Tk. Banding	-	Orang
- Mutasi Hakim Ad Hoc Tipikor Tk. Pertama	-	Orang
- Mutasi Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri	48	Orang
- Mutasi Hakim Ad Hoc Perikanan	-	Orang
Total	48	Orang

Tabel 3.7 Mutasi dan Penempatan Hakim Ad Hoc

c. Hukuman Disiplin Hakim

	Berat	Sedang	Ringan	Jumlah
- Hakim Pengadilan Negeri	2	4	41	47
- Hakim Pengadilan Tinggi	17	1	6	24
- Hakim Ad Hoc Tipikor PN	-	-	-	0
- Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri	-	-	-	0
Total	19	5	47	71

Tabel 3.8 Hukdis Hakim

d. Pensiun, Diberhentikan dan Meninggal Dunia Hakim

	Pensiun	Diberhentikan	Diberhentikan Sementara	Mengundurkan Diri	Meninggal
- Hakim Pengadilan Negeri	21	2	-	2	10
- Hakim Pengadilan Tinggi	73	4	-	3	13
- Hakim Ad Hoc	-	-	-	-	-
Total	94	6	0	5	23

Tabel 3.9 Pensiun, Diberhentikan dan Meninggal Dunia Hakim

e. Diklat Hakim

e.1. Diklat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Diklat dan peserta dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, berikut rincian dari kegiatan diklat seperti:

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Bimtek RJ	472 Orang
2.	Bimtek PBH	299 Orang
3.	Diseminasi Penegak Hukum	40 Orang
4.	FGD Kepaniteraan (Jurusita)	44 Orang
5.	Bimtek PHI	25 Orang

Tabel 3.10 Diklat Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

e.2. Diklat yang dilakukan di luar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badilum hanya memberikan nama-nama peserta mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis kepada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK), berikut rincian diklat atau Bimbingan Teknis yang dilakukan seperti:

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Sertifikasi Mediator	60 orang
2.	Pelatihan SPPA	96Orang
3.	Judicial Dialog	150 Orang
4.	Pelatihan Terpadu	10 Orang
5.	Pelatihan Pilot Trainir pidana	30 Orang
6.	Pilot Project	1Orang
7.	Pelatihan Bukti Digital	4 Orang
8.	Pelatihan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu	40 Orang
9.	Pelatihan National Association of women judges	3 Orang
10.	Pelatihan Cours in Diversied commercial Dispute Settlement Mechanism in belt and road Regional and countries	2 Orang
11.	Lokakarya modul elitigasi, regional perlindungan konsumen, sanksi alternatif dan perdagangan manusia	44 Orang
12.	Peserta KEPPH	184 Orang
13.	Wawancara pemantauan dan evaluasi Implementasi	6 Orang
14.	Diklat Akses Perempuan berhadapan dengan Hukum	60 Orang
15.	FGD Kepailitan/PKPU dan HKI	124 Orang
16.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tindak pindan Siber	5 Orang
17.	Workshop RJ	4 Orang

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
18.	Peserta regional celebration Alumni ILEA, Pelatihan ILEA	5 Orang
19.	Pelatihan Pertahanan hakim	71 Orang
20.	Sertifikasi Hakim Tipikor	90 Orang
21.	Sertifikasi Lingkungan Hidup	70 Orang
22.	Pelatihan perkara TPPU	82 Orang

Tabel 3.11 Diklat Hakim Oleh Litbang

- **Panitera**

- f. **Data Kepaniteraan Seluruh Indonesia**

- Data Kepaniteraan per Gender

No	Jabatan	PT		PNI/K		PNI/A		PNI/B		PNI/II		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Panitera	29	4	13	1	43	9	100	13	159	36	407
2	Panitera Muda Pidana	23	9	11	4	38	14	84	25	131	45	384
3	Panitera Muda Perdata	29	4	12	3	29	23	83	22	126	50	381
4	Panitera Muda Hukum	24	8	9	6	38	12	70	36	103	71	377
5	Panitera muda Tipikor	23	10	6	1	16	7	1	.	.	.	64
6	Panitera Muda PHI	.	.	4	3	15	9	.	1	.	.	32
7	Panitera Muda Perikanan	.	.	1	1	2	1	1	.	.	1	7
8	Panitera Muda Niaga	.	.	4	1	5
9	Panitera Pengganti	289	221	217	242	241	367	275	288	263	214	2.617
10	Jurusita	.	.	76	16	139	47	189	46	206	37	756
11	Jurusita Pengganti	.	.	88	89	110	82	152	54	117	38	730
Total		417	256	441	367	671	571	955	485	1.105	492	5.780

Tabel 3.12 Data Kepaniteraan Pergender

– Kenaikan Pangkat Panitera

No	Bulan	Jumlah
1	Februari	17
2	April	275
3	Juni	8
4	Agustus	29
5	Oktober	155
6	Desember	22
Total		506

Tabel 3.13 Kenaikan Pangkat Panitera

g. Promosi dan Mutasi Panitera

No	Jabatan	Jumlah Mutasi PT		Jumlah Mutasi PN	
1	Panitera	15	Orang	158	Orang
2	Panitera Muda	53	Orang	504	Orang
3	Mutasi Panitera Pengganti	10	Orang	124	Orang
4	Pengangkatan Panitera Pengganti	92	Orang	165	Orang
5	Mutasi Jusurita	-	Orang	20	Orang
6	Pengangkatan Jusurita	-	Orang	31	Orang
7	Lepas Jabatan Pandmud	4	Orang	19	Orang
8	Lepas Jabatan PP	-	Orang	-	Orang
9	Lepas Jabatan JS	-	Orang	8	Orang
10	PK TPM	-	Orang	7	Orang
Total		174	Orang	1,029	Orang

Tabel 3.14 Promosi dan Mutasi Panitera

h. Hukuman Disiplin Panitera

No	Jabatan	Jumlah Hukdis Ringan	Jumlah Hukdis Sedang	Jumlah Hukdis Berat	Jumlah
1	Panitera	5	-	3	8
2	Panitera Muda Hukum	2	1	1	4
3	Panitera Muda Niaga	-	0	-	0
4	Panitera Muda Perdata	1	1	2	4
5	Panitera Perikanan	-	-	-	0
6	Panitera PHI	1	-	1	2
7	Panitera Muda Pidana	1	-	1	2
8	Panitera Muda Tipikor	1	-	-	1
9	Panitera Pengganti	14	6	6	26
10	Jusurita	6	1	3	10
11	Jusurita Pengganti	6	1	-	7
Total		37	10	17	64

Tabel 3.15 Hukuman Disiplin Panitera

i. Pensiun dan Meninggal Panitera

No	Jabatan	Jumlah			
		Pensiun & Berhenti / Diberhentikan		Meninggal	
		PT	PN	PT	PN
1	Panitera	8	5	-	2
2	Panitera Muda Hukum	5	5	-	-
3	Panitera Muda Niaga	-	-	-	-
4	Panitera Muda Perdata	6	9	-	2
5	Panitera Perikanan	-	-	-	1
6	Panitera PHI	-	-	-	-
7	Panitera Muda Pidana	7	11	-	3
8	Panitera Muda Tipikor	6	-	1	2
9	Panitera Pengganti	97	140	9	7
10	Jurusita	-	53	-	3
11	Jurusita Pengganti	-	48	-	3
Total		129	271	10	23

Tabel 3.16 Pensiun dan Meninggal

2. Sumber Daya Manusia Non Yustisial

A. Data Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 110 (seratus sepuluh) dengan sebaran jabatan sebagai berikut:

Dipimpin oleh eselon I yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan dibantu oleh 3 eselon II, terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 1 orang; Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 1 orang; Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 1 orang, 11 orang eselon III, 34 orang eselon IV, 33 orang fungsional, 3 orang Hakim Yustisial, 25 orang Pelaksana serta 0 CPNS.

– Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2024

No	Unit	Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Fungsional dan PPPK	Hakim Yustisial	Pelaksana	CPNS	Jumlah
1	Pimpinan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekreteriat	-	1	4	12	15	3	9	-	44
3	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	-	1	4	13	15	-	8	-	41
4	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	-	1	3	9	3	-	8	-	24
Jumlah		1	3	11	34	33	3	25	0	110

Tabel 3.17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural

– Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Unit Kerja	Golongan					Total
		I	II	III	IV	IX	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1	5	29	8	2	45
2	Direktorat Tenaga Teknis Peradilan Umum	-	-	34	7	1	42
3	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	-	3	16	5	-	24
Jumlah							111

Tabel 3.18 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

– Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Golongan	Ruangan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Pendidikan										Keterangan
		L	P		S3		S2		S1		D3		SLTA		
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
IV	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	C	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	B	4	2	6	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	
	A	6	4	10	-	-	3	4	3	-	-	-	-	-	
III	D	17	13	30	1	-	3	5	13	8	-	-	-	-	
	C	9	11	20	-	-	5	7	3	4	-	-	1	-	
	B	5	11	16	-	-	1	-	4	7	-	-	-	4	
	A	6	6	12	-	-	-	-	6	3	-	3	-	-	
II	D	3	1	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
	C	1	5	6	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	
	B	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX/PPPK	-	2	1	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
Jumlah		56	55	111	1	0	19	19	31	23	3	7	2	4	
Jumlah				109											

Tabel 3.19 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin

B. Pelatihan, Diklat dan Aseesment

Jumlah Diklat untuk pejabat Administrator sebanyak 4 orang, diklat pejabat Pengawas sebanyak 17 orang dan diklat berjenjang bagi pejabat fungsional sebanyak 31 orang. Kegiatan publik speaking dan Konsinyering Analis Jabatan Dan ABK Tahun 2024 sebanyak 64 orang Pegawai, melakukan diklat dengan 2 kegiatan Diklat Manajemen resiko dan Diklat ASN sebanyak 13 Orang, Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan Pegawai (Kesamaptaan) sebanyak 38 Orang dan Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 Orang.

C. Rekrutmen, Latsar dan Piagam

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tidak melaksanakan rekrutmen bagi tenaga teknis maupun non teknis. Perekrutan hanya untuk tenaga PPNPN, hanya saja untuk tahun 2024 tidak

ada perekrutan. Sedangkan penerima penghargaan Piagam dan Satya Lencana dengan jenis penghargaan XXX sebanyak 6 orang, XX sebanyak 0 sedangkan dengan jenis Dwi Windu sebanyak 1 Orang. Kegiatan pembinaan dan karekter building bagi Pegawai Ditjen Badilum diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN, Pelaksanaan Simulasi CAT CASN bagi PPNPN diikuti 29 Orang dan Pelantikan Pejabat Pengawas di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 13 orang.

D. Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar

Jenis	Pensiun	Meninggal	Pindahan/Keluar
Data	2	0	6
Jumlah	8		

Tabel 3.20 Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar

E. Kenaikan Pangkat

No	Bulan	Jumlah
1	Februari	3
2	April	7
3	Juni	2
4	Agustus	1
5	Oktober	4
6	Desember	3
Jumlah		20

Tabel 3.21 Kenaikan Pangkat

3. Bimbingan Teknis Peradilan Umum

Penanganan perkara dengan keadilan restoratif menjadi salah satu alternatif penegakan hukum di Indonesia. Keadilan restoratif atau *retorative justice* adalah penyelesaian perkara melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pihak korban, terdakwa, keluarga korban, maupun pihak lainnya yang terkait. Keadilan restoratif adalah program nasional maka daripada itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Bimbingan Teknis terkait *restorative justice*, dan

memberikan bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum, diadakan bimbingan ini guna perempuan sering mengalami permasalahan seperti sering berurusan dengan penegak hukum yang belum memiliki persepektif gender, viktimisasi, perempuan sebagai korban di periksa bersama terdakwa, norma hukum yang masih berorientasi pada terdakwa, dan tidak adanya pendamping bagi perempuan saat berhadapan dengan hukum dan cara menyikapinya, tetapi dalam hal ini bukan memberi keistimewaan atau perlakuan khusus perempuan berhadapan dengan hukum bukan untuk mengistimewakan, namun meberikan kesetaraan bagi perempuan sebagai kalangan rentan yang sering terdiskriminasi. Bimbingan ini dilakukan oleh pimpinan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui daring dan juga bertatap muka dengan para hakim.



Gambar 3. 1 Bimbingan Teknis

Daftar kegiatan bimbingan teknis sebagai berikut:

a. Kegiatan Bimtek Yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Pelatihan	Tanggal	Orang
1.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	19 s.d 20 Maret 2024	108
		23 s.d 25 April 2024	100
		20 s.d 30 Mei 2024	100
		12 s.d 16 Agustus 2024	52
		8 s.d 10 Oktober 2024	45
		13 – 15 November 2024	67
2.	Bimtek Teknis Perempuan Berbadan dengan Hukum	21 s.d 23 Februari 2024	50
		19 s.d 20 Maret 2024	48
		23 s.d 25 Juli 2024	92
		27 s.d 29 Agustus 2024	82
		23 s.d 25 Oktober 2024	27
3.	Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan	20 s.d 22 Februari 2023	40
4.	FGD Kepaniteraan (Jurusita)	4 s.d 6 Maret 2024	44
5.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara PHI	3 s.d 5 Desember 2024	25

Tabel 3. 22 Kegiatan Bimtek Ditjen Badilum

b. Kegiatan Bimtek tenaga teknis yang tidak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Pelatihan	Tanggal	Orang
Data Diklat Tenaga Teknis			
1.	Lokakarya pengembangan modul pelatihan elitigasi kasus perubahan lingkungan untuk Hakim di ASEAN	5 s.d 6 Februari 2024	12
2.	Lokakaraya regional perlindungan konsumen WG – JET CACJ	Februari 2024	10
3.	Lokakarya sanski alternatif wilayah PT denpasar	1 s.d 2 Juli 2024	6

No	Pelatihan		Tanggal	Orang
			6 Februari 2024	10
4.	Sertifikasi Mediator		29 Februari 2024	50
			1 s.d 12 Juli 2024	10
			14 s.d 27 Juli 2024	
5.	Judicial Dialog tentang rahasia dagang		26 Februari 2024	150
6.	Pelatihan terpadu antara penyidik Komnas HAM, penyidik kejaksaan dan penuntut umum serta hakim tentang penanganan perkara pelanggaran HAM		3 Mei 2024	10
7.	-	Peserta mengikuti Pilot Trainir pidana pengawasan dan pidana kerja sosial	20 Mei 2024	7
			20 s.d 21 Juni 2024	8
	-	Kegiatan trainer pilot penerepan pidana bersyarat untuk wilayah PT DKI Jakarta, banten	25 s.d 26 Juni 2024	15
	-	Narasumber Pilot Project penerapan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial	20 s.d 21 Juni 2024	1
8.	Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)		16 Januari 2024	13
			19 Maret 2024	20
			20 Mei 2024	3
			23 Oktober 2024	60
	Pelatihan Bukti Digital		11 s.d 15 Maret 2024	4

No	Pelatihan	Tanggal	Orang
9.	Pelatihan tematik Penyelesaian tindak pidana pemilu secara daring	5 s.d 7 Februari	40
10.	Pelatihan Sertifikasi Hubungan Industrial (PHI)	27 Oktober 2024 s.d 9 November 2024	90
11.	Pelatihan tematik Perempuan berhadapan dengan hukum	6 s.d 9 Agustus 2024	30
		23 s.d 27 September 2024	30
12.	National Association of women judges 2024 annual Conference/NAWJ di san diego	17 s.d 19 Oktober 2024	3
13.	Training Cours in Diversied Commercial Dispute Settlement Mechanisms ini belt & road Region and countries di Chongqing	1 s.d 30 Desember 2024	2
14.	- Usulan peserta workshop Implementasi KEPPH peningkatan kapasitas hakim	20-22 Februari 2024	10
	- Pemberitahuan dan Permohonan Izin Peserta peningkatan kapasitas hakim/eksplorasi KEPPH daring	4 s.d 7 Maret 2024	25
	- Peningkatan kapasitas hakim pelatihan Ekplorasi KEPPH Surabaya	23 s.d 26 April 2024	60
	- Peningkatan kapasitas hakim pelatihan Ekplorasi KEPPH Mataram	21 s.d 26 Oktober 2024	30
	- Permohonan perubahan waktu pelatihan ekplorasi kode etik dan pedoman prilaku hakim KEPPH peningkatan kapasitas hakim	14 s.d 18 Mei 2024	30
	- Workshop KEPPH di Balikpapan	25 s.d 27 Juni 2024	12

No	Pelatihan	Tanggal	Orang
	- Workshop penanganan perkara di pengadilan dalam perspektif KEPPH di Semarang	18 s.d 20 September 2024	17
15.	Permohonan penunjuk hakim untuk wawancara terkait pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dan permohonan dispensasi kawin	18 Maret 2024	6
16.	Pelatihan peningkatan kapasitas tindak pidana siber bagi hakim di asia Tenggara, Bangkok	10 s.d 14 Juni 2024	5
17.	Penugaskan peserta workshop on restorative justice pilot project UNODC Denpasar	2 s.d 6 April 2024	4
18.	Undangan peserta perseorangan untuk menghadiri regional celebration for the 2024 ILEA day award sebagai alumni ILEA	14 s.d 17 mei 2024	1
19.	Pelatihan International Law Enforcement academy/ILEA PEC Bangkok	4 s.d 8 November 2024	4
20.	Pelatihan Sertifikasi pertanahan bagi hakim peradilan umum	30 September 2024	71
21.	Lokakarya tentang perdagangan manusia	18 April 2024	6
22.	Sertifikasi hakim Tipikor Tahun 2024	10 s.d 23 November 2024	90
23.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Tahun 2024	1 s.d 15 Desember 2024	70
24.	Peserta FGD Kepailitan/PKPU dan HKI	2 s.d 5 Juli 2024	58
		5 s.d 8 November 2024	66
25.	Pemohonan peserta pelatihan pemeriksaan perkara TPPU bagi Hakim Mahkamah Agung RI	4 Maret 2024	62
		13 Mei 2024	20

Tabel 3. 23 Bimtek Oleh Litbang

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

1. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA/005.03.1.097450/2023 Tanggal 30 November 2024 dengan 2 (dua) Program Kerja yaitu "Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Dukumen Manajemen" dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 497/DJU/PL08/4/2012 tentang Pelaksanaan anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bebas KKN.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 149.234.382.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewenangan	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	Presentasi (%)
1	Pusat	Belanja Pegawai	9,633,715,000	9,581,833,919	99.46
2		Belanja Barang	47,212,092,000	45,540,315,005	96.46
3		Belanja Modal	7,784,000,000	7,782,824,886	99.98
Jumlah			64,629,807,000	62,904,973,810	97.33
4	Daerah	Pagu Daerah	84,604,575,000	82,079,844,318	97.02
Jumlah			149,234,382,000	144,984,818,128	97.15

Tabel 4.1 Pagu

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 64.629.807.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 62.904.973.810,- (enam puluh dua milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan seratus sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 97,33 %, sedangkan pagu anggaran daerah sebesar Rp.84.605.575.000,- (delapan Puluh empat

milyar enam ratus empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.82.079.844.318,- (delapan puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan persentase capaian sebesar 97,02%, sehingga jumlah alokasi seluruhnya sebesar Rp 149.234.382.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 144.984.818.128,- (seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah) atau 97.15%.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2024

NO	KODE DAN NAMA KEGIATAN	ANGGARAN				Kinerja (%)			
		PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI %	TARGET	REALISASI		
(005.03.07)									
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM									
1	(1046) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp	2,971,635,000	Rp	2,952,161,684	19,473,316	99.34	100%	100%
2	(1049) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	84,604,575,000	Rp	82,079,844,318	2,524,730,682	97.02	100%	100%
3	(6243) Dukungan Manajemen Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp	53,382,164,000	Rp	51,866,284,303	1,515,879,697	97.16	100%	100%
4	(6627) Dukungan Manajemen Teknis Peradilan Umum	Rp	5,521,388,000	Rp	5,333,526,679	187,861,321	96.60	100%	100%
5	(6630) Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp	2,754,620,000	Rp	2,753,001,144	1,618,856	99.94	100%	100%
Jumlah		Rp	149,234,382,000	Rp	144,984,818,128	4,249,563,872	97.15	100%	100%

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran

Terdapat pemblokiran anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tentang penyampaian rincian target penghematan belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024 sebesar Rp. 2.122.891.000,- sehingga realisasi anggaran tidak tercapai 100%.

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Manajemen Aset/Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, selama periode Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengelola Aset/Barang Milik Negara meliputi:

A. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan gedung dan bangunan rumah negara/dinas yang diperuntukan untuk para hakim, pejabat dan pegawai di lingkungan peradilan umum.

Tanah yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
1	Jl. Sitalasari No B2 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	1	352	No. 3571394 Hak Pakai No 62
2	Jl. Sitalasari No B1 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	2	398	No. 3571396 Hak Pakai No 64
3	Jl. Sitalasari No B3 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	3	296	No. 3571396 Hak Pakai No 67
4	Jl. Sitalasari No C4 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	4	416	No. 3567643 Hak Pakai No 68
5	Jl. Sitalasari No B4 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	5	335	No. 3569803 Hak Pakai No. 69
6	Jl Cipinang Jaya LL No B1 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	6	337	No. 3567643 Hak Pakai No.104

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
7	Jl Cipinang Jaya LL No B2 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	7	266	No.3567720 Hak Pakai No. 103
8	Jl Cipinang Jaya LL No C2 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	8	266	No. 3567648 Hak Pakai No. 105
9	Jl Cipinang Jaya LL No C3 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	9	266	No. 3567723 Hak Pakai No. 109
10	Jl Cipinang Jaya LL No C6 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	10	377	No. 3567637 Hak Pakai No. 114
11	Jl Cipinang Jaya LL No B3 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	11	266	No. 3567645 Hak Pakai No. 111
12	Jl Cipinang Jaya LL No C1 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	12	264	No. 35677222 Hak Pakai No. 108
13	Jl Cipinang Jaya LL No C4 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	13	263	No. 3567721 Hak Pakai No. 107
14	Jl Cipinang Jaya LL No B5 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	14	266	No. 3567644 Hak Pakai No. 112
15	Jl Cipinang Jaya LL No B4 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	15	266	No. 3567646 Hak Pakai No. 113
16	Jl. Ampera Raya Gang Sulastri No C1- C12, B1-B2 Rt 05 Rw 02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	16	4.724	No 3599029 Hak Pakai No. 10
17	Jl. Ampera Raya Gang Rini No C1- C12 Rt. 06 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	17	3.108	No. 3598691 Hak Pakai No. 16
18	Jl. Flamboyan II & IV Kel. Sunter Mas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	18	9.240	No. 6809219 Hak Pakai No. 41

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
19	Jl. Antariksa III No. C8 Kel. Cipinang Besar Selatan	20	152	No. 3567717 Hak Pakai No 59
20	Jl. Swakarsa 4 Rt 03 Rw 02 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	22	813	No. 852582 Hak Pakai No 524
21	Jl. Ampera raya Gang Kancil No C1- C7	23	4.075	No 3560575 Hak Pakai No. 12
22	Jl. Cipinang Jaya LL No C7, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	24	270	No. 3567647 Hak Pakai No 110
23	Jl. Agung Tengah 1 dan 4 Kel. Sunter Agung, Kec Tanjung priok	25	10.138	No. 6869348 Hak Pakai No. 41
24	Jl. Agung Tengah 1 No. C1-C3 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	26	550	No. 7005392 Hak Pakai No. 53
25	Jl. Ampera Raya Terusan I Gang Polri Rt 03 Rw 02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	27	1675	No 558794 Hak Pakai No. 59
Total			39.379	

Tabel 4.3 Tanah

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Golongan/Type	Jumlah
1.	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit
2.	4.01.02.01.004	Rumah Negara Golongan I Type B Permanen	4 unit
3.	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	46 unit
4.	4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	5 unit
5.	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	16 unit
6.	4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	14 unit
Jumlah Gedung dan Bangunan			86 unit

Tabel 4.4 Gedung dan Bangunan

C. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas Operasional yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua):

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Honda WF 125 SF	1	2006	B.6122.SQA	Baik
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2	2006	B.6121.SQA	Rusak Berat
3.	Honda Mega Pro GL 160 D	4	2006	B.6124.SQA	Baik
4.	Honda Mega Pro GL 160 D	5	2006	B.6125.SQA	Rusak Berat
5.	Honda Mega Pro GL 160 D	6	2006	B.6126.SQA	Baik
6.	Honda Mega Pro GLP III	7	2005	B.6237.SRQ	Baik
7.	Honda Mega Pro GLP III	8	2005	B.6238.SRQ	Rusak Berat
8.	Honda Mega Pro GLP III	9	2005	B.6239.SRQ	Baik
9.	Honda Mega Pro GLP III	10	2005	B.6240.SRQ	Rusak Berat
10.	Honda NF 125 TRF	16	2008	B.6562.SQO	Baik
11.	Honda NF 125 TRF	17	2008	B.6567.SQO	Baik
12.	Honda NF 125 TRF	18	2008	B.6565.SQO	Baik
13.	Honda NF 125 TRF	19	2008	B.6566.SQO	Baik
14.	Honda NF 125 TRF	20	2008	B.6563.SQO	Baik
15.	Honda NF 125 TRF	21	2008	B.6564.SQO	Baik
16.	Honda Mega	22	2003	B.6306.PCQ	Rusak Berat
17.	Honda Mega Pro GLP III	26	2005	B.6952.PCQ	Baik

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
18.	Honda Mega Pro GLP III	24	2005	B.6954.PCQ	Rusak Berat
19.	Honda Mega Pro GLP III	25	2005	B.6953.PCQ	Rusak Berat
20.	Honda Supra X 125	26	2015	B.6867.PYG	Baik
21.	Honda Supra X 125	27	2015	B.6868.PYQ	Baik

Tabel 4.5 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat):

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Toyota Kijang Innova G M/T	1	2006	B.1127.FQ	Baik
2.	Toyota Avanza E M/T	2	2006	B.1354.FQ	Baik
3.	Toyota Avanza E M/T	4	2006	B.1343.FQ	Baik
4.	Toyota Avanza E M/T	7	2006	B.8167.WU	Baik
5.	Toyota Avanza G M/T	8	2006	B.8170.WU	Baik
6.	Toyota Avanza E M/T	14	2007	B.2560.UQ	Baik
7.	Toyota Avanza E M/T	15	2007	B. 2647.UQ	Baik
8.	Toyota Avanza G M/T	17	2007	B. 2655.UQ	Baik
9.	Toyota Rush S 1.5 A/T	19	2014	B. 1359.PQR	Baik
10.	Toyota Kijang Innova G A/T	20	2015	B.1733.PQR	Baik
11.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 BC	21	2015	B.7434.PPA	Baik
12.	Toyota Kijang Innova V A/T	22	2011	B.1337.PX	Rusak Berat

Tabel 4.6 Kendaraan Dinas Operasional Roda empat

3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (enam):

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Hyundai	6	2009	B.7524.IO	Rusak Berat
2.	Mitsubishi	7	2007	B.7223.IO	Rusak Berat
3.	Hyundai	8	2009	B.7518.IO	Baik

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
4.	Toyota Dyna 130 XT	9	2013	B.7197.PPA	Baik
5.	Toyota Dyna 130 XT	10	2013	B.7198.PPA	Baik

Tabel 4.7 Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam

D. Peralatan dan Mesin (Perkantoran)

Peralatan dan Mesin yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Ket./Kondisi
1.	Mesin Absensi	4 Unit	Baik
2.	Server	12 Unit	Baik
3.	Rak Server	6 Unit	Baik
4.	Filling Kabinet Besi	109 Unit	Baik
5.	Lemari Besi	224 Unit	Baik
6.	Rak Besi	130 Unit	Baik
7.	Kursi Besi/Metal	510 Unit	Baik
8.	Brandkas	9 Unit	Baik

Tabel 4.8 Peralatan dan Mesin

Melakukan Transfer Keluar Aset/Barang Milik Negara berupa :

- a. CCTV kepada 4 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi;
- b. Printer dan scanner kepada 174 satuan kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- c. Komputer/PC 73 satuan kerja Pengadilan Negeri
- d. Laptop sebanyak 3 unit pada Pengadilan Tinggi Palembang dan ac split 2 unit sebanyak 2 Pengadilan Negeri
- e. TV monitor dan Bracket kepada 11 Satuan Pengadilan.

E. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja. Oleh karena itu Peningkatan

Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung terus dilakukan Tahun Anggaran 2024 antara lain dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Modal	Volume
1.	Meja/Kursi Podcast	5 Unit
2.	Spring Bed	2 Unit
3.	Meja Kerja	1 Unit

Tabel 4.9 Pengadaan Sarpras Belanja Modal

b. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Renovasi Rumah Negara Jl. Ampera Raya Gg. Kancil No C6	1 Unit

Tabel 4.10 Pembangunan/Rehabilitas Gedung dan Bangunan

F. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

a. Pengadaan Kebutuhan/Keperluan Perkantoran (Belanja Barang)

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Barang	Volume
1	Keperluan Pokok Pegawai (Air Minum, Majalah/Koran, dll)	12 Bulan
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	3 Paket
3	Bahan Penggandaan Kertas/Toner	3 Paket
4	Map dan Amplop	1 Paket
5	Pencetakan dan Pengadaan Blanko/Formulir/Kop Surat dan keperluan kantor lainnya	2 Paket
6	Pengadaan Kalender Dinding Ditjen Badilum	3500 Unit
7	Pengadaan Kalender Meja Ditjen Badilum	3500 Unit
8	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	1 Paket
9	Pengadaan Pakaian Dinas Putih MA	1 Paket

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Barang	Volume
10	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	12 Bulan
11	Pengadaan Sewa Tanaman Dalam Pot	12 Bulan
12	Pengadaan Pewangi Ruangan dan Pemeliharaan	12 Bulan
13	Pengadaan Sewa Dispenser	12 Bulan
14	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional (11 Unit)	12 Bulan
15	Pengadaan Provider Internet	12 Bulan
16	Pengadaan Provider Internet Server/Backup	12 Bulan

Tabel 4.11 Pengadaan Kebutuhan Perkantoran (Belanja Barang)

b. Pemeliharaan Operasional Perkantoran (Belanja Barang)

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Negara Ditjen Badilum Jl. Cipinang Jaya LL No. C4	1 Paket
2.	Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Negara Ditjen Badilum Jl. Agung Tengah I No C15-C16	1 Paket

Tabel 4.12 Pemeliharaan Operasional Kantor (Belanja Barang)

1. Pelaksanaan Perbaikan/Prasarana Kantor dengan rician sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Lemari	1	Unit
2	Televisi	3	Unit
3	AC Split	6	Unit
Jumlah		10	

Tabel 4.13 Perbaikan/Prasarana Kantor

2. Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda 2	9	Unit
2	Kendaraan Dinas Roda 4	11	Unit
3	Kendaraan Dinas Roda 6	5	Unit
Jumlah		20	

Tabel 4.14 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

c. Pengelolaan Sarana Kerja Pengadilan yang meliputi :

- Pengadaan Buku Agenda Sidang Hakim Pengadilan Negeri sebanyak 2.500 buku
- Buku Jurnal Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi, Buku Induk Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi dan Buku keuangan Perkara 1.852 buku
- Buku jurnal keuangan perkara PN 6.601 buku
- Buku SKUM/Kwitansi PN 873 buku
- Buku Keuangan Biaya Eksekusi 1.000 buku
- Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan PN 948 buku
- Buku Induk Keuangan perkara 910 buku
- Buku kas bantu PT dan PN 920 buku
- Register Tipikor dan Register Niaga sebanyak 1.075 register
- Register Pidana sebanyak 9.996 register
- Register Perkara Pidana Anak sebanyak 3.093 register
- Register Perdata sebanyak 4.833 register
- Register PHI dan register Keuangan PHI 855 register
- Toga Hakim PT dan PN sebanyak 800 stel
- Jas Panitera sebanyak 1.000 Stel
- Tanda Jabatan Hakim dan Panitera sebanyak 1.275 buah
- Bendera Mahkamah Agung Sebanyak 360 buah
- Pencetakan PIN WBK sebanyak 200 buah

G. Persuratan

Adapun klasifikasi surat tersebut adalah:

1. Penerimaan surat masuk dari Januari sampai Desember tahun 2024 sebanyak 10.719 (Sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas) surat dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Dirjen	Sesdit	Dir Dit. Bin Ganis	Dir Dit. Papu
1	Januari	195	39	600	321
2	Februari	98	50	579	226
3	Maret	81	35	408	214
4	April	84	23	295	219
5	Mei	105	30	307	213
6	Juni	165	34	369	239
7	Juli	251	59	474	368
8	Agustus	228	56	513	235
9	September	223	51	322	283
10	Oktober	267	75	267	196
11	November	424	40	250	283
12	Desember	413	30	256	226
Jumlah		2,534	522	4,640	3,023
Total		10,719			

Tabel 4.15 Surat Masuk

- Pengiriman Surat Keluar dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia maupun oleh Staf Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum sebanyak 3.508 (tiga ribu lima ratus delapan) surat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Surat Terkirim Melalui Pos	Jumlah Dikirim Melalui Pegawai
1	Januari	332	153
2	Februari	287	68
3	Maret	202	122
4	April	119	43
5	Mei	203	78
6	Juni	163	3
7	Juli	215	76
8	Agustus	268	21
9	September	155	83
10	Oktober	250	92
11	November	235	49
12	Desember	201	90
Jumlah		2,630	878
Total		3,508	

Tabel 4.16 Surat Keluar

- Jumlah Penomoran surat yang dikeluarkan sebanyak 9.640 (sembilan ribu enam ratus empat puluh) nomor surat dengan rincian sebagai berikut:

No	Penomoran	Diren Badilum			Sekretariat			Direktorat Bimbingan			Direktorat Papu			Pengadaan Barang/Lasa			
		Surat Biasa	Surat Keputusan	Surat SP, ST, SKET, Peng-Undangan	Surat Biasa	Surat Keputusan	Surat SP, ST, SKET, Peng-Undangan	Surat Biasa	Surat Keputusan	Surat SP, ST, SKET, Peng-Undangan	Surat Biasa	Surat Keputusan	Surat SP, ST, SKET, Peng-Undangan	Memorandum	Surat Edaran	SK PBJ	Surat Biasa PBJ
1	Januari	260	121	12	183	20	67	126	0	8	42	2	13	21	0	50	8
2	Februari	123	351	12	78	8	46	95	0	28	11	1	10	5	0	92	14
3	Maret	455	20	25	132	2	44	51	1	10	20	0	13	19	0	53	8
4	April	310	25	34	77	3	47	87	22	0	23	2	12	7	0	68	9
5	Mei	193	14	41	102	30	58	44	0	26	18	0	13	11	0	65	8
6	Juni	143	41	30	139	5	60	53	0	15	18	2	13	11	0	8	0
7	Juli	151	40	37	130	2	55	73	1	33	18	0	15	15	0	172	30
8	Agustus	121	203	36	105	6	53	98	1	25	22	3	31	16	0	72	13
9	September	143	117	40	126	8	45	48	1	32	7	0	12	27	0	109	8
10	Oktober	158	62	29	132	42	77	105	0	29	17	0	14	25	0	171	24
11	November	151	24	41	127	132	50	59	0	42	20	0	5	13	3	248	55
12	Desember	135	34	13	275	121	52	56	0	26	25	1	24	24	1	126	25
Jumlah		2,343	1,052	350	1,606	379	654	895	26	274	241	11	175	194	4	1,234	202
Total		9,640															

Tabel 4.17 Penomoran Surat

✦ 3. Pengelolaan Teknologi Informasi ✦

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu dilakukan pemeliharaan dan pemutakhiran alat pengolah data dan pendukung lainnya seperti:

A. Pemeliharaan

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah
1.	Laptop	1 Unit

Tabel 4.18 Pemeliharaan

B. Pemutakhiran

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Modal	Volume
1.	PC Unit	10 Unit
2.	Laptop	8 Unit
3.	Printer	10 Unit
4.	Scanner	3 Unit

Tabel 4.19 Pemutakhiran

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Zona Integritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerima penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mendapat predikat tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. ZI diberikan kepada instansi yang melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum selalu mengingatkan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengeluarkan Surat Edaran No 4 Tahun 2024 tentang peningkatan Integritas bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur di Lingkungan Peradilan Umum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum senantiasa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh serta tidak membuka celah terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. Memastikan ketersediaan dan kemudahan akses standar pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan atau masyarakat pencari keadilan;
- c. Setiap penolakan maupun penerimaan gratifikasi diwajibkan untuk melaporkannya paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) KPK (gol.kpk.go.id);
- d. Pimpinan pengadilan agar selalu berupaya menjadi tauladan bagi jajarannya sesuai dengan nilai-nilai utama lembaga peradilan;
- e. Pimpinan pengadilan terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik dalam maupun di luar kedinasan, serta tidak terhadap penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya;

- f. Memastikan setiap pengaduan atau keluhan dari masyarakat terkait pelayanan pengadilan harus ditangani secara serius dan segera dengan mekanisme yang jelas;
- g. Pada penugasan di luar dinas, semua pimpinan, hakim dan aparatur di lingkungan peradilan umum dilarang menerima pemberian baik uang maupun oleh-oleh dari satuan kerja/pegawai satuan kerja, jamuan makan, dijemput oleh satuan kerja dengan kendaraan sewaan yang dibayar oleh satuan kerja, uang saku dan/pembayaran hotel oleh satuan kerja.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu biasa disebut PTSP adalah layanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Penilaian PTSP sangat ketat dan secara langsung turun ke satuan kerja untuk menilai dengan kriteria-kriteria yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya lomba PTSP ini diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang berorientasi pada hasil dalam bentuk pelayanan prima pada masyarakat dan mengurangi hambatan birokrasi. Sehingga diadakan lomba untuk meningkatkan kinerja di Pengadilan, Pemenang Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 yaitu:

No	Type	Klasifikasi	Pengadilan Tinggi
1.	B	I.	Riau
2.	B	II.	Palangkaraya
3.	A	III.	Jakarta
4.	A	IV.	Denpasar
5.	A	V.	Jawa Tengah

No	Type	Klasifikasi	Pengadilan Tinggi
6.	A	VI.	Surabaya
7.	A	VII.	Banjarmasin

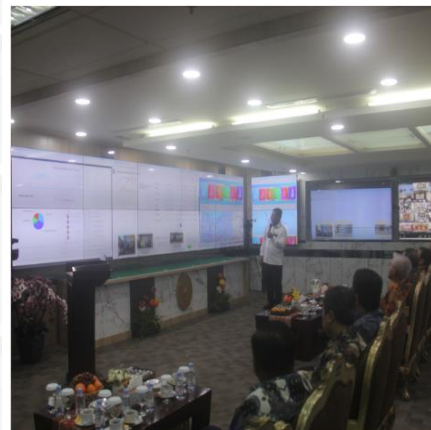
No	KLAS	Klasifikasi	Pengadilan Negeri
1.	IA K	I.	Surakarta
		II.	Jakarta Pusat
		III.	Makassar
		IV.	Jakarta Selatan
2.	IA	I.	Denpasar
		II.	Jember
		III.	Pati
		IV.	Gresik
		V.	Yogyakarta
		VI.	Lubuklinggau
3.	IB dan II	I.	Bangkinang
		II.	Singaraja
		III.	Negara
		IV.	Karawang
		V.	Lahat
		VI.	Tanjung
		VII.	Cikarang
		VIII.	Bantaeng
		IX.	Marisa
		X.	Karanganyar
		XI.	Sorong
		XII.	Sampit

Tabel 5.1 Penghargaan PTSP

3. Inovasi Pelayanan Publik

A. Beberapa inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang merupakan inovasi layanan peradilan dalam bentuk aplikasi maupun kebijakan antara lain :

1. Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi atau disebut dengan Satu Jari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan secara terintegrasi dan *real time*. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, pemantauan dan evaluasi terhadap perkara peradilan umum, pelaksanaan eksekusi, realisasi anggaran, barang milik negara, peta dan profil pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, data pegawai, data Kepaniteraan (upaya hukum, mediasi, klasifikasi perkara dan eksekusi, survei pelayanan (SPAK dan SKM), informasi



perkara yang menarik perhatian publik, Gambar 5. 1 Satu Jari dan data tenaga teknis (data hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri dan hakim yustisial). Dari hasil pemantauan

dan evaluasi kinerja pengadilan diperlukan pengembangan aplikasi di antaranya penambahan menu kinerja panitera pengganti, perbaikan data eksekusi, perbaikan statistik perkara dan perbaikan data evaluasi implementasi SIPP (EIS).

Manfaat aplikasi satu jari di paparkan ke beberapa delegasi yang berkunjung kerja untuk meningkatkan kerjasama, pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait pengadilan seperti OPDAT (*Office of Overseas prosecutorial Development, Assistance and Training*) atau kantor Pengembangan, bantuan dan pelatihan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehakiman Amerika Serikat dan Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan, Republik Rakyat China.

2. **Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi** merupakan aplikasi yang digunakan untuk publikasi dan pengawasan dalam melaksanakan eksekusi pada pengadilan negeri seluruh Indonesia. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi saat ini dilakukan pengembangan diantaranya :

- pengiriman notifikasi menggunakan *Whatsapp* resmi Mahkamah Agung RI yang di generate secara otomatis dan dikirim melalui pesan *Whatsapp* sehingga perlu dilakukan migrasi ke akun *Whatsapp* resmi Mahkamah Agung; dan
- penambahan tahap akhir pelaksanaan eksekusi dan catatan pada detil eksekusi yang belum dilaksanakan.

3. **SiGanis**

Merupakan Ekosistem Digital yang menjadi wadah berbagai inovasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta sebagai sarana pembinaan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.

Terdapat beberapa aplikasi layanan yang telah tersedia, antara lain :



Gambar 5. 2 Aplikasi SiGanis

a. Ruang Tamu Virtual Bentuk layanan berupa silaturahmi, konsultasi dan izin/persetujuan yang dilakukan secara virtual atau online yang dapat ditujukan kepada Subdit Mutasi Hakim, Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita, Subdit Pengembangan Tenaga Teknis, dan Subdit Data Evaluasi.

b. Perisai Badilum Merupakan Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum yang diselenggarakan

menggunakan metode

hybrid yaitu secara luring maupun daring melalui *zoom meeting* yang diikuti 382 Satker Pengadilan Tingkat Pertama dan 34 Satker Pengadilan Tinggi.

c. Dimensi

Adalah akronim dari daftar inventarisasi masalah teknis administrasi yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan Perisai Badilum.

4. Ampuh (sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh)

adalah program kerja yang merupakan lanjutan dari program akreditasi penjaminan mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum. Program kerja ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas aparatur peradilan, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Ruang lingkup Ampuh meliputi seluruh penerapan tugas fungsi dan kinerja sesuai standar pelayanan yaitu manajemen peradilan; administrasi perkara dan persidangan; administrasi umum; pelayanan publik; pengelolaan kas; pengadaan barang dan jasa; pengawasan dan penanganan pengaduan.

Penilaian Ampuh menitik beratkan pada *core business* yang dilakukan melalui Asesment elektronik pelayanan PTSP, asesmen administrasi perkara secara elektronik melalui Aplikasi EIS dan SATU JARI serta asesmen kinerja dan layanan yang dilakukan secara langsung. Hasil dari penilaian adalah

- Paripurna;
- Unggul;
- Utama;
- Baik;
- Cukup.

penerima penghargaan untuk tahun 2024 yang berhasil memperoleh predikat unggul sebanyak 62 satuan kerja yaitu 20 Pengadilan Tinggi dan 42 Pengadilan Negeri. Dengan perolehan untuk Pengadilan Tinggi dengan nilai 850-1000, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA dengan nilai 825 – 900, sedangkan untuk Pengadilan Kelas IB dan II dengan nilai 800 – 850. Sementara predikat Paripurna dapat diraih setelah satuan kerja meraih predikat unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Selain itu dalam rangka pemberian layanan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang bertujuan

untuk membantu memudahkan dalam pemberian layanan.
Informasi Sarana dan Prasarana Disabilitas

Sarana dan prasarana disabilitas sudah mulai diterapkan di seluruh Pengadilan di Indonesia sesuai peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Daftar sarana dan prasarana Disabilitas dan Data statistik penyandang disabilitas berdasarkan wilayah Hukum sebagai berikut :

1. Daftar Sarana dan Prasarana Disabilitas pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tahun 2024

No	Nama Sarana dan Prasarana Disabilitas	Ada	Tidak Ada
1	Kursi Roda	410	6
2	Walker / Alat Bantu Jalan	382	34
3	Antrian Prioritas di PTSP untuk penyandang Disabilitas	395	21
4	Form Penilaian Personal di Meja PTSP	386	30
5	Ruangan sidang yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang Disabilitas	332	84
6	Lahan Parkir Dekat Pintu Masuk dengan lambang aksebilitas	407	9
7	selasar Khusus penyandang disabilitas	336	80
8	Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas	404	12
9	Toilet khusus penyandang disabilitas	406	10
10	Jalur Pedestrian	304	112
11	Guiding block	397	19
12	Warning block	365	51
13	Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat	353	63
14	Tangga dilengkapi dengan handrail	352	64
15	Ramp/bidang landai di dalam bangunan gedung yang dilengkapi handrail	235	181
16	Ramp/bidang landai luar bangunan gedung yang dilengkapi handrail	314	102
17	Rambu/papan petunjuk harus informatif dan mudah dikenali oleh pengguna dan pengunjung pengadilan	383	33
18	Buku Braile	362	54
19	Komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar / Audio	237	179
20	Laman pada website yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas	391	25
21	Media komunikasi audio (Audio book / screen reader)	258	158
22	Alat bantu dengar	340	76
23	Fasilitas bagi penyandang disabilitas intelektual (ruang kesehatan, obat-obatan)	323	93
Jumlah		8,072	1,496

Tabel 5.2 Sarpras Disabilitas

2. Statistik Penyandang Disabilitas sebagai Pihak Berperkara Tahun 2024

NO	Pengadilan Tinggi	Statistik Penyandang Disabilitas				
		Penggugat/P emohon	Tergugat/T ermohon	Terdakwa	saksi	Korban
1	Banda Aceh	0	0	0	137	0
2	Medan	0	0	0	17	0
3	Padang	0	0	0	3	0
4	Riau	0	0	0	2	0
5	Jambi	0	0	0	2	0
6	Palembang	0	0	0	11	0
7	Bengkulu	0	0	0	18	0
8	Tanjung Karang	2	0	0	17	0
9	Bangka Belitung	0	0	0	1	0
10	Jakarta	0	0	1	43	0
11	Bandung	0	0	0	25	0
12	Semarang	0	0	0	27	2
13	Yogyakarta	0	0	0	7	0
14	Surabaya	3	0	1	120	2
15	Banten	0	0	0	4	2
16	Denpasar	0	0	0	4	0
17	Mataram	0	0	1	8	0
18	Kupang	0	0	0	14	8
19	Pontianak	0	0	0	2	0
20	Palangkaraya	0	0	0	2	0
21	Banjarmasin	0	0	0	4	0
22	Samarinda	0	1	0	9	0
23	Manado	0	0	0	5	0
24	Palu	0	0	0	4	0
25	Makassar	0	0	1	14	0
26	Kendari	0	0	0	4	0
27	Gorontalo	0	0	0	1	0
28	Ambon	0	0	0	4	1
29	Maluku Utara	0	0	0	4	1
30	Jayapura	0	0	0	3	0
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
32	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0
33	Sulawesi Barat	0	0	0	1	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0
Total		5	1	5	517	16

Tabel 5.3 Statistik Disabilitas Berperkara

4. Kunjungan Internasional

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2024 mendapat kunjungan dari beberapa negara dengan tujuan bertukar pengalaman, menjalin kerja sama terkait pengamanan persidangan, penanganan perkara perceraian, perlindungan perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga, pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait peradilan. Kunjungan tersebut dari **Kantor Pengembangan Bantuan dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri (Office Of Overseas Prosecutorial Develeopment, Assistance and Training, OPDAT)** dan kementerian Kehakiman Amerika Serikat (**United States Departement Of Justice, USDOJ**). Yang kedua **Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)**. Dan kunjungan ketiga dari **Pimpinan Peradilan dan Hakim dari Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan, Republik Rakyat China**. tidak lupa pada kunjungan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mempromosikan pemanfaatan Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari) yang mempunyai manfaat untuk mempermudah pemantauan penyelesaian perkara, pelaksanaan mediasi hingga eksekusi yang dilakukan oleh satuan kerja di daerah, pembinaan kinerja aparat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, tidak hanya itu ada manfaat lain dari aplikasi satu jari yaitu bisa memantau penanganan perkara perceraian, perkara perlindungan anak dan perempuan serta korban kekerasan.

Kunjungan Delegasi



Gambar 5. 3 Kunjungan Diligasi

BAB V I PENGAWASAN

1. INTERNAL

Dalam rangka mendapatkan pelayanan publik yang mudah, transparan dan dengan biaya yang ringan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan berbagai pembinaan terhadap satuan kerja (unit pelaksana teknis) di bawahnya dan terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui:

- a. Pengawasan terhadap jam kerja dari mulai jam masuk hingga jam pulang kantor oleh seluruh pimpinan secara berjenjang;
- b. Mengadakan Pembinaan berupa Peningkatan Disiplin berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/SK/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang peningkatan Kinerja baik terhadap pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun panitera serta pegawai;
- ✦ c. Memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) berupa promosi atau mutasi terhadap tenaga teknis hakim maupun panitera serta pegawai;
- d. Melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh terhadap Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dan Pembinaan Teknis Asesor;
- e. Memonitoring ke Pengadilan yang menerima anggaran pos Bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan serta pembebasan biaya perkara, mengenai pelaksanaan dan penyerapan anggaran tersebut;
- f. Melaksanakan pembinaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serap anggaran di seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum;
- g. Memonitoring pengadilan tentang PTSP, layanan hukum Prodeo, pelaksanaan layanan posbakum, sidang di luar gedung pengadilan, pelaksanaan e-litigasi Pengadilan Negeri, pelaksanaan E-litigasi

Hakim, Keterbukaan Informasi Publik, Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara, *role model*, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dan penerapan Aplikasi Pelayanan Publik dengan cara memberikan penghargaan lewat lomba.

2. EVALUASI

- a. Mengevaluasi data-data yang masuk dari pengadilan-pengadilan yang telah di monitoring yaitu administrasi peradilan umum dan kebutuhan sarana kerja pengadilan;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran posbakum, sidang di luar Gedung Pengadilan serta pembebasan biaya perkara;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serap anggaran di seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum melalui pemanggilan terhadap satker yang daya serapnya masih rendah;
- d. Pemeliharaan lomba kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan peradilan yang mudah di gunakan oleh masyarakat dan dalam mencapai visinya yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung” melalui program dan inovasi di bidang informasi teknologi untuk dapat menghadirkan peradilan yang modern, mudah diakses, biaya ringan dan berkeadilan serta dapat melayani masyarakat pencari keadilan. Tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mencapai keberhasilan antara lain:

- a. Melaksanakan *Fit and Proper Test dan Profile Assesment* terhadap Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri;
- b. Selalu memberikan bimbingan teknis tentang menghadapi perempuan berhadapan dengan hukum dan selalu mengingatkan untuk sarana dan prasarana tentang disabilitas.
- c. Selalu memonitoring Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi, aplikasi Satu Jari dan Ampuh (sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh).
- d. Penyerahan penghargaan lomba PTSP kepada 29 Pengadilan, layanan hukum 21 Pengadilan, administrasi perkara dan keuangan kepada 22 Pengadilan, SAKIP sebanyak 3 Pengadilan, role model pimpinan sebanyak 13 Orang, role model panitera sebanyak 10 orang, role model sekretaris 17 orang, kinerja hakim sebanyak 6 orang, SIPP sebanyak 90 Pengadilan, Keterbukaan Informasi publik 26 Pengadilan;
- e. Melakukan Pembinaan secara berkala pada pengadilan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 dan 8 Tahun 2016;

- f. Daya serap anggaran Tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu sebesar 97,33%, daya serap anggaran pada satker daerah sebesar 97,02%. Maka rata – rata penyerapan menjadi 97,15%.

2. REKOMENDASI

Sebagai lanjutan capaian akreditasi yang sudah mencakup Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024 akan melaksanakan:

- a. Penilaian penghargaan lomba PTSP dan program Ditjen Badilum lainnya;
- b. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum, target Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 75% dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;
- c. Selalu memonitoring aplikasi aplikasi Satu Jari, UMK Cerdas KUM, dan Ampuh (sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh).



SURAT KEPUTUSAN

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum**

TAHUN 2024



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR : 1191/DJU/SK.OT1.2/XII/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi kinerja dan media pertanggungjawaban, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkewajiban membuat laporan akhir tahun;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu dikeluarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengenai pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang...

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; ✦
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.

PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:

KEDUA....

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan bertugas menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan terkait Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum guna kelancaran Pelaksanaan tugas;
3. Menggabungkan data-data unit Eselon II untuk disusun menjadi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 30 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

BAMBANG MYANTO

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
3. Arsip.

Lampiran I
 Surat Keputusan Direktur Jenderal
 Badan Peradilan Umum
 Nomor : 1191/DJU/SK.OT1.2/XII/2024
 Tanggal : 30 Desember 2024



TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

TIM Penyusun	Nama	Jabatan
Pembina	H. Bambang Myanto, S.H., M.H	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Pengarah	Kurnia Arry Soelakaono, S.E., S.H., M.Hum	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
	Zahlisa Vitalita, S.H. M.H	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
	Hasanudin, S.H., M.H	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
Ketua	Puji Mulyani, S.E., M.M	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Anggota	Lies Khadijah, S.H., M.H	Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring
	Herti Setiawati, RR., S.E., M.Hum	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis
	Sukatno, S.H	Kepala Bagian Umum
	Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si	Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera dan Jurusita
	Romi Permana, S.H., M.H	Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim
	Edwin Ruliawan, S.H., M.H	Kepala Bagian Kepegawaian
	Candra, S.H	Kepala Sub Direktorat Tata Kelola
	Budi Setioko, S.H., M.H	Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi
	Saenal Akbar, S.H., M.H	Kepala Sub Direktorat Data dan Evaluasi
	Nopinus Andreas Purba, SE	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Ratna Sari, S.H	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan
	Aris Priyanto, S.T	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Suwarni, S.H	Kepala Sub Bagian mutasi Kepegawaian
	Indra Kurniawan, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
	Septin Sri Noni, S.E	Kepala Seksi Tata Naskah Mutasi Hakim

TIM Penyusun	Nama	Jabatan
	Ade Supriatna, S.H., M.H	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
	Ade Soniawati, S.H., M.H	Kepala Seksi Tata Naskah Mutasi Panitera
	Arif Hidayat, S.Kom	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi
	Nenny Isfiany Sitohang, S.H., LL.M	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
	Aditya Widyartadi, S.Kom	Kepala Seksi Statistik
	Riswan Haryo Yudianto, S.Kom	Pranata Komputer
	Vanny Pebrianti, A.md	Klerek Pengelola Data dan Informasi

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO